

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT**

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2020 dapat tersusun, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya di berikan kepada Tim Lakip dan semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam melaksanakan program/kerja selama 1 (satu) tahun melalui beberapa indikator kinerja dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat tahun 2020. Laporan ini juga merupakan evaluasi kinerja Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun - tahun berikutnya.

Merauke, Januari 2021
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman
NIP. 196905312006041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020 yang menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Kinerja kegiatan masing-masing program diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dalam prakteknya terdapat 7 (tujuh) Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Merauke. Terdapat 7 indikator dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Merauke tahun 2020 yaitu :

1. Jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
6. Kinerja implementasi WBK Satker
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Dari 7 (tujuh) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 diperoleh hasil semua indikator capaiannya melebihi 100 % dengan rincian : Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 118,78 %, Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 110.83 %, Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara sebesar 113,68 %, Nilai kinerja anggaran sebesar 110 %, Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 125 %, Kinerja implementasi WBK Satker sebesar 118,29 %, Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 114,89 %.

Fungsi dari penilaian indikator-indikator tersebut adalah menemukan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian hasil. Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun berikutnya, diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, selalu berkoordinasi untuk peningkatan jejaring kerja baik dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....		ii
DAFTAR ISI.....		iii
DAFTAR RINGKASAN/DEFENISI/ISTILAH.....		iv
DAFTAR TABEL.....		v
DAFTAR GRAFIK.....		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan tujuan	3
	C. Tugas pokok dan fungsi.....	3
	D. Struktur organisasi.....	4
	E. Sumber Daya Manusia	11
	F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
	A. Perencanaan Kinerja.....	17
	B Perjanjian Kinerja	20
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
	A. Pengukuran Kinerja.....	21
	B Sumber Daya Anggaran	54
	C Sumber Daya Sarana dan Prasarana	63
BAB IV.	PENUTUP	67
	A Kesimpulan.....	67
	B. Tindak Lanjut	67

DAFTAR SINGKATAN/DEFINISI/ISTILAH

KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan
PLBD	: Pos Lintas Batas Darat, merupakan pintu masuk melalui darat di suatu Negara, termasuk yang digunakan oleh kendaraan darat dan kereta api.
Direktorat Jenderal P2P	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Vektor	: Serangga atau hewan lain yang biasanya membawa bibit penyakit yang merupakan suatu risiko bagi kesehatan masyarakat
Alat angkut	: Pesawat udara, kapal laut, kereta api, kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya yang digunakan dalam melakukan perjalanan internasional
Pelabuhan	: Pelabuhan laut atau pelabuhan yang terletak pada sungai dan danau, tempat kapal yang melakukan perjalanan datang dan berangkat.
PHEIC	: Public Health Emergency of International Concern, merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia
Karantina	: Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit. Pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lainnya, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
Sanitasi	: suatu usaha pencegahan penyakit dengan menyingkapkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Rencana aksi kegiatan 2020-2024 18
Tabel 2	Rencana kinerja tahunan 19
Tabel 3	Perjanjian kinerja 20
Tabel 4	Target dan capaian kinerja 22
Tabel 5	Jumlah pengawasan orang, barang, alat angkut dan lingkungan 24
Tabel 6	Realisasi anggaran indikator jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan..... 28
Tabel 7	Data faktor risiko yang dikendalikan 29
Tabel 8	Realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan 31
Tabel 9	Persentase parameter indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk 34
Tabel 10	Realisasi anggaran indikator pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 38
Tabel 11	Capaian keluaran kegiatan 39
Tabel 12	Realisasi anggaran indikator nilai kerja anggaran 40
Tabel 13	Tingkat kepatuhan penyampaian LK 43
Tabel 14	Realisasi anggaran persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan 44
Tabel 15	Realisasi anggaran indikator kinerja implementasi WBK Satker 47
Tabel 16	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN 49
Tabel 17	Realisasi anggaran indikator persentase peningkatan kapasitas ASN 51
Tabel 18	Capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 52
Tabel 19	Capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang 53
Tabel 20	Realisasi belanja persumber dana 54
Tabel 21	Serapan anggaran perbulan 55
Tabel 22	Realisasi permasing-masing indikator 56
Tabel 23	Realisasi pelayanan output 58
Tabel 24	Neraca sarana dan prasaran .. 54

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Distribusi ASN berdasarkan jabatan 11
Grafik 2	Distribusi ASN berdasarkan latar belakang pendidikan..... 12
Grafik 3	Rincian Pegawai Honorer..... 12
Grafik 4	Distribusi ASN berdasarkan ASN dan Honorer..... 13
Grafik 5	Distribusi ASN berdasarkan golongan 14

DAFTAR GAMBAR		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi	3
Gambar 2	Wilker Pelabuhan Laut Agats	9
Gambar 3	Wilker Pelabuhan Laut Bade	10
Gambar 4	Wilker Pelabuhan Laut Wanam	11
Gambar 5	Wilker PLBDN Sota	
Gambar 6	Wilker PLBD Mindiptana	23
Gambar 7	Pos Pelabuhan Laut Merauke	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Secara umum pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) orang Indonesia telah naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, UHH orang Indonesia telah mencapai 71,5 tahun, di mana UHH perempuan lebih tinggi 5 tahun dibandingkan dengan laki- laki (perempuan 74 tahun, laki-laki 69 tahun). Pendekatan terbaru untuk melihat kualitas tahun hidup, tidak semata-mata UHH, namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (*Healthy Adjusted Life Expectancy/HALE*). HALE orang Indonesia secara rata-rata adalah 62,65 tahun, artinya terdapat 8,85 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit *zoonosis* (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (*new emerging*

diseases), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit *zoonosis*, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Ancaman ketahanan kesehatan dapat muncul dalam bentuk ancaman biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit baru, kekurangan pangan, terlepas dari asal atau sumbernya. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang (baru) muncul adalah penyakit *zoonosis*. Munculnya penyakit Covid-19 pada akhir tahun 2019 yang telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia pada awal tahun 2020 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pandemi telah membuka mata kita semua bahwa setiap negara termasuk Indonesia harus melakukan kesiapsiagaan (*preparedness*) dalam menghadapi penyakit infeksi baru, baik kemampuan pencegahan (*to prevent*), penemuan (*to detect*), dan merespon (*to respond*).

Terbukanya transportasi secara luas di dalam negeri maupun antar negara dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu, respon ketahanan kesehatan atau *health security* penting untuk dilakukan. Evaluasi eksternal gabungan atau *Joint External Evaluation* (JEE) tahun 2017 mengidentifikasi bahwa sistem ketahanan kesehatan Indonesia masih lemah di bidang koordinasi dengan sektor lain. Dalam pencegahan, deteksi dan respon terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat; kualitas pengawasan, khususnya terkait patogen yang resisten terhadap antibiotik, penyakit infeksi baru, dan PD3I; dan analisis dan komunikasi data. Karena penyakit infeksi baru hampir semuanya bersifat *zoonosis* dan berkaitan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berperan dalam mewujudkan **Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan pelaksanaan 9 misi pembangunan, khususnya misi ke-1 yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sesuai arahan Presiden RI terkait pembangunan SDM yakni pembangunan SDM pekerja yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Kementerian kesehatan memiliki peran penting dalam rangka mencapai 9 (sembilan) agenda prioritas nasional yang dikenal dengan Nawacita, terutama agenda ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke secara tertulis, untuk mengetahui pencapaian program/kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2020, yang harus dipertanggungjawabkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mengalami perubahan dengan penambahan beberapa pasal yang tertuang dalam Permenkes Nomor 2348/ Menkes/Per/X1/2011, sehingga klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan terbagi menjadi 4 kelas yaitu Kelas I, II, III dan IV. Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan

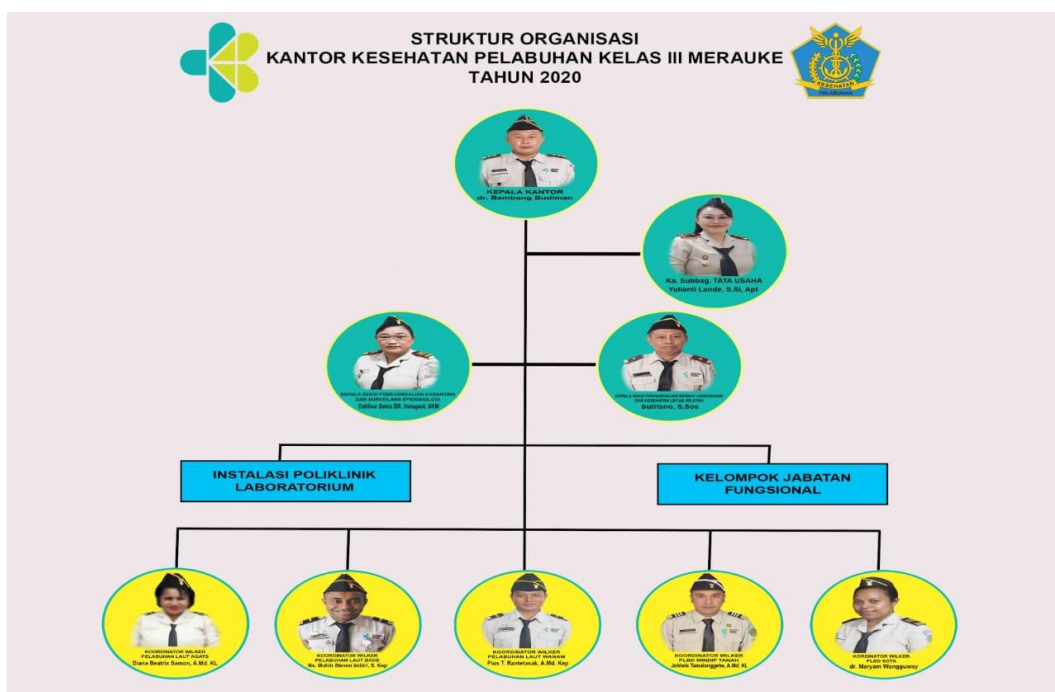
KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, Surveilans Epidemiologi, Kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan (OMKABA), serta pengamanan terhadap pengamanan penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, Bioterrorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat.

2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Pelaksanaan kekarantinaan
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
- d. Pelaksanaan pengamanan penyakit, penyakit potensial wabah penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pegion dan non pegion, biologi dan kimia,
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional.
- g. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana kesehatan serta kesehatan matra termasuk peyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara,

- i. Pelaksanaan pemberian sertifikasi obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen OMKABA import,
- j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatan
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas negara,
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara,
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan,
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

D. Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berlokasi di Jl. Prajurit No. 01 Merauke Provinsi Papua, berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata UsahaSeksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
4. Instalasi
5. Wilayah Kerja

Tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PK & SE)

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja, bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara

3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Instalasi

- a. Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi
- b. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan non struktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait

- d. Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan
- e. Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala KKP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

5. Wilayah kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari seksi sub bagian Tata Usaha, seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW), Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi. Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan dan memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Merauke terletak pada 137° - 141° BT dan 6° - 9° LS. Luas Kabupaten Merauke ±45.071 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke merupakan dataran rendah dan berawan. Secara geografis, berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea dan Australia.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke memiliki 5 wilayah kerja yang terletak di 4 (empat) kabupaten :

a. Wilker Pelabuhan Laut Agats/Asmat

Wilker Pelabuhan Laut Agats terletak di Kabupaten Asmat, Pelabuhan.Laut Agats dapat ditempuh melalui jalur udara dengan waktu tempuh 1 jam atau jalur perjalanan laut selama ±48 jam. Sumber Daya Manusia sebanyak 4 Orang yang terdiri dari koordinator wilayah dengan latar belakang pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan, 1 orang S1 Epidemiolog dan dibantu 2 orang tenaga honorer perawat dan SMA (petugas kebersihan)



Gambar 2 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Agats

b. Wilker Pelabuhan laut Bade

Pelabuhan Laut Bade terletak di Kabupaten Mappi, Pelabuhan Laut Bade dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 6 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Bade 3 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan perawat dan dibantu 2 orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan sanitarian dan SMA (petugas kebersihan)



Gambar 3 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Bade

c. Wilker Pelabuhan Laut Wanam

Pelabuhan Laut Wanam terletak di Kabupaten Merauke, Pelabuhan Laut Wanam dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur laut dengan waktu tempuh 36 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Wanam 2 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan perawat dan dibantu 1 orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan sanitarian .



Gambar 4 Pelabuhan Laut Wanam

d. Wilker Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD)

Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota terletak di Kabupaten Merauke, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 1,5 jam (80 km). Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD) 3 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan dokter, 1 orang Sanitarian dan dibantu 2 orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan perawat dan SMA (petugas keamanan)



Gambar 5 Kantor Wilker PLBDN Sota

e. Wilker Pos Lintas Batas Darat Mindiptana

Pos Lintas Batas Darat Mindiptana berada di Kabupaten Boven Digoel Distrik Kombut (pemekaran dari Distrik Mindiptana). Dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 10-11 jam. Perjalanan darat dari Kabupaten Merauke melewati Kabupaten Boven Digoel dengan jarak tempuh sekitar 475 km (8 Jam, dilanjutkan ke Distrik Mindiptana dengan jarak tempuh 110 km (2,5 jam). Dari Distrik Mindiptana menuju Distrik Kombut jaraknya 11 km dengan waktu tempuh 30 menit jika akses jalan bagus, tetapi jika hujan dan jalan rusak maka waktu tempuh bisa sampai 3 jam. Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Mindiptana 2 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan sanitarian dan dibantu 1 orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan perawat.



Gambar 6 Wilker PLBD Mindiptana Distrik Kombut

f. Pos Pelabuhan Laut Merauke

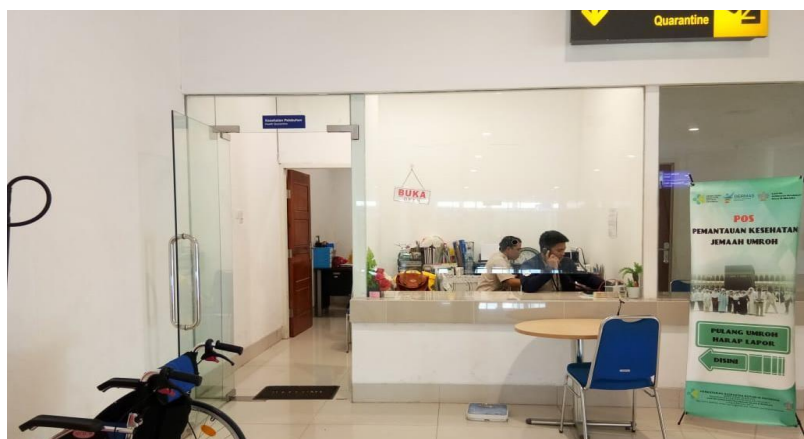
Pelabuhan Laut Merauke terletak di Kabupaten Merauke yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama \pm 10 menit. Setiap hari petugas dari induk dijadwalkan melakukan pengawasan di Pelabuhan laut Merauke



Gambar 7 Kantor Pos Pelabuhan Laut Merauke

g. Pos Bandar Udara Mopah

Bandar Udara Kelas I Mopah merupakan bandara kelas I yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan kota-kota lain di Indonesia, terdapat 4 Maskapai penerbangan Nasional yang beroperasi di Bandara Mopah yaitu : maskapai penerbangan Garuda Air Lines, Lion Air Lines, dan Batik Air yang menggunakan Pesawat Boing 373-800NG, disamping itu juga terdapat Maskapai Susi Air dengan pesawat sejenis Twin otter/Caravan dan Pesawat Hercules milik TNI yang mengangkut bahan keperluan TNI dan mengangkut porsonil militer lainnya. Setiap hari petugas dari kantor induk dijadwalkan bertugas di Bandara Mopah.



Gambar 8 Pos Bandar Udara Mopah

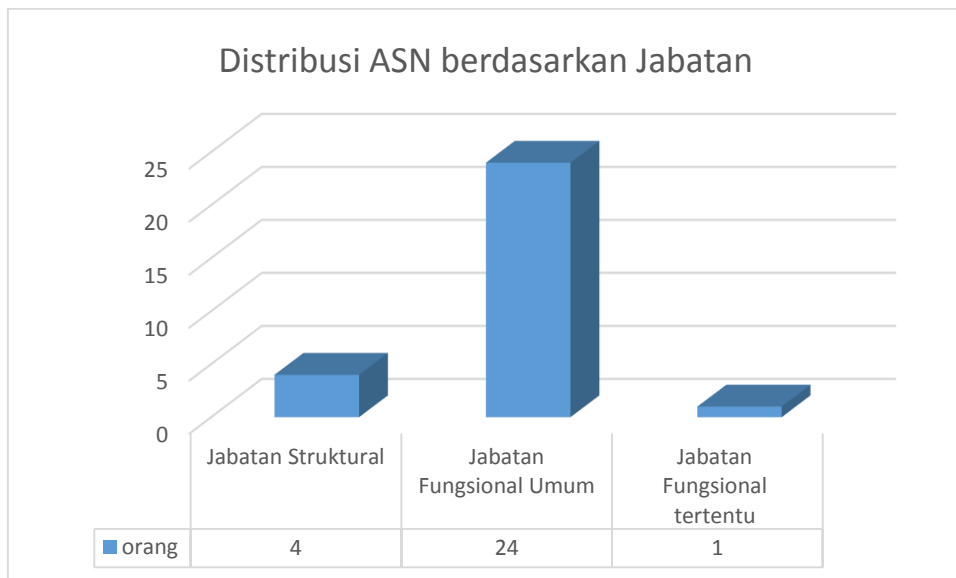
E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Jumlah SDM (pegawai) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke per 31 Desember 2020 sebanyak 51 orang (PNS sebanyak 29 orang dan tenaga honorer sebanyak 22 orang) dan rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan

- Jabatan Struktural : 4 orang
- Jabatan Fungsional Umum : 24 orang
- Jabatan Fungsional tertentu : 1 orang (Entomolog)

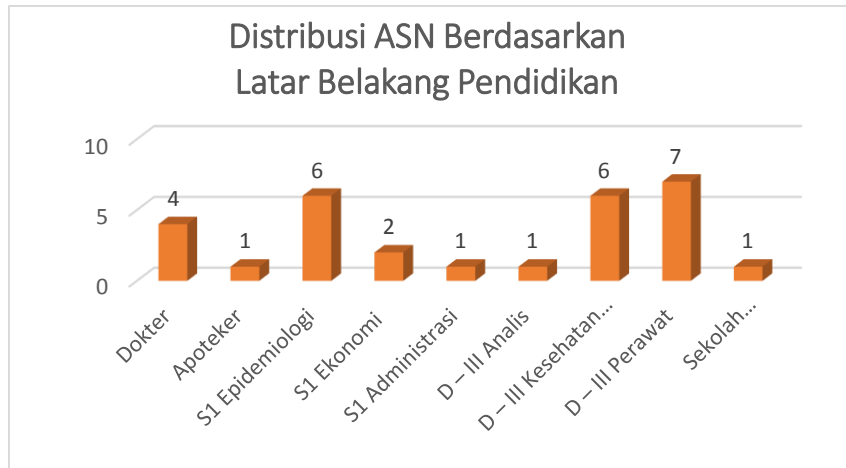


Grafik 1 Distribusi ASN berdasarkan Jabatan

2. Tingkat dan Jenis Pendidikan

- Profesi
 - Dokter : 4 orang
 - Apoteker : 1 orang
- Strata 1 (S1)
 - S1 Epidemiologi : 6 orang
 - S1 Ekonomi : 2 orang
 - S1 Administrasi : 1 orang

- Diploma 3 (D III)
 - D – III Analis : 1 orang
 - D – III Kesehatan Lingkungan : 6 orang
 - D – III Perawat : 7 orang
- Sekolah menengah atas (SMA) : 1 orang

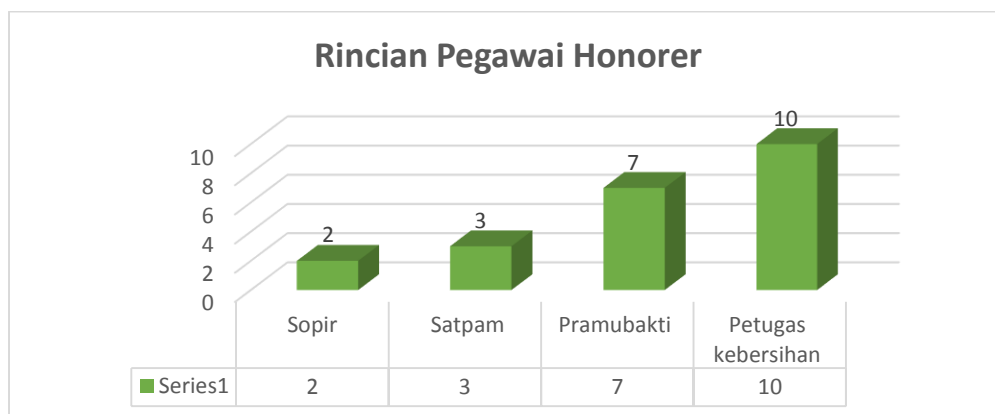


Grafik 2 Distribusi ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Terdapat 2 orang pegawai atas nama Andarias Paskawanto Kolawi, SKM dan Gumson Josua Tampubolon, SKM yang telah menyelesaikan pendidikan S2 tetapi masih sementara dalam proses pengurusan pencantuman gelar

3. Rincian pegawai honorer berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut :

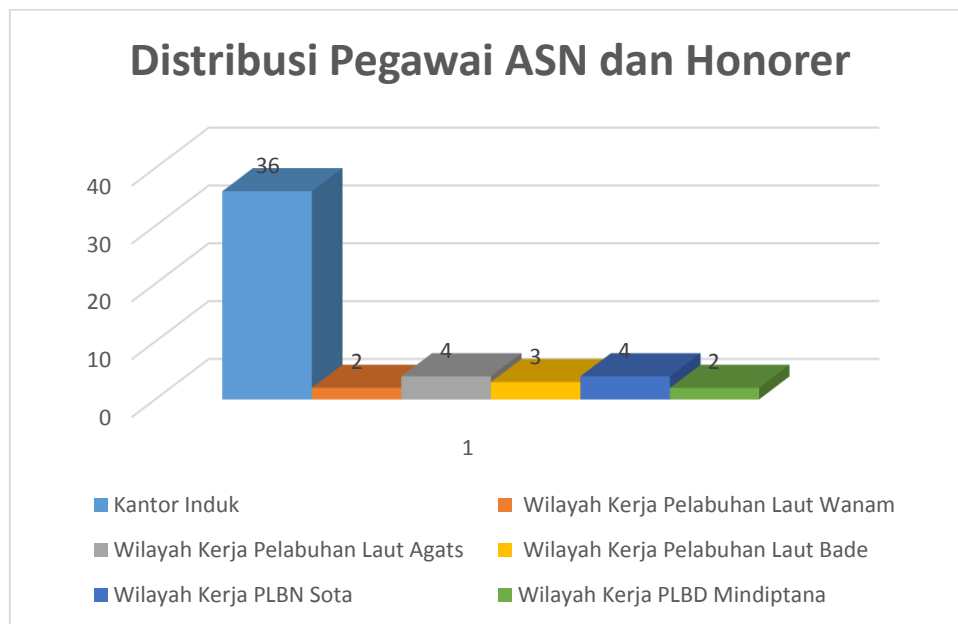
- Sopir : 2 orang
- Satpam : 3 orang
- Pramubakti : 7 orang
- Petugas kebersihan : 10 orang



Grafik 3 Rincian Pegawai Honorer

4. Distribusi ASN dan Honorer

- Kantor Induk : 36 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam : 2 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Agats : 4 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade : 3 orang
- Wilayah Kerja PLBN Sota : 4 orang
- Wilayah Kerja PLBD Mindiptana : 2 orang

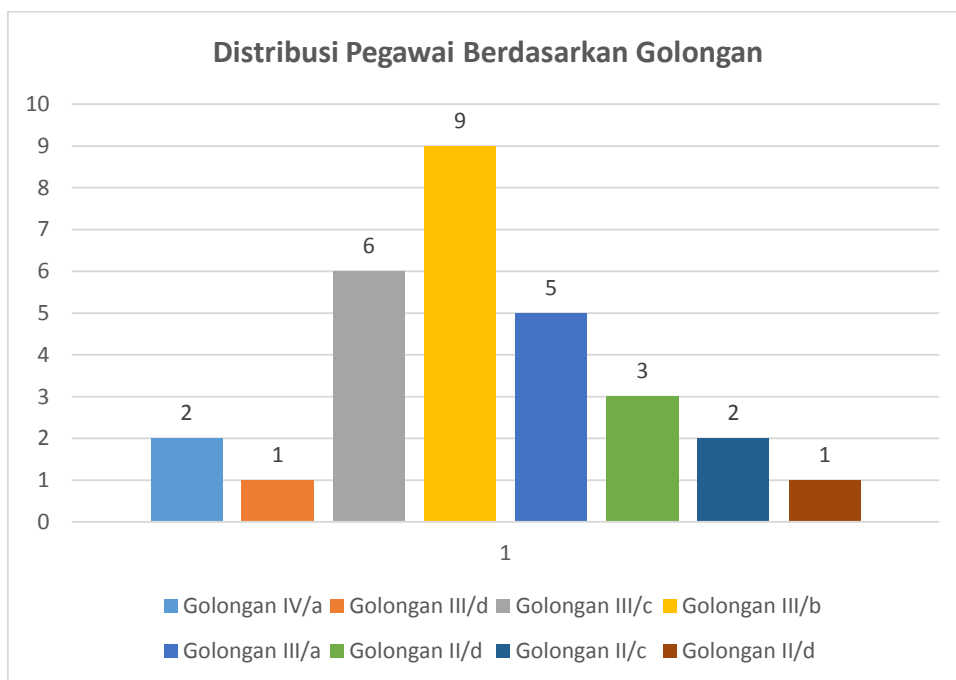


Grafik 4 Distribusi ASN dan Honorer

Distribusi pegawai di kantor induk sebanyak 36 orang, hal ini disebabkan karena di wilayah Merauke selain Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, Pelabuhan Kali Tamu, Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Serapu dan Pelabuhan Lampu Satu. Setiap hari pegawai di kantor induk ditugaskan secara bergantian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan dan Bandara Mopah Merauke.

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 1 orang
- Golongan III/c : 6 orang
- Golongan III/b : 9 orang
- Golongan III/a : 5 orang
- Golongan II/d : 3 orang
- Golongan II/c : 2 orang
- Golongan II/d : 1 orang



Grafik 5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

6. Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar

Upaya memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke telah mengirimkan pegawai untuk dapat meningkatkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar. Tahun 2020 terdapat 1 orang pegawai yang melakukan tugas belajar di Universitas Cenderawasih Jayapura atas nama Batseba Linda Imsula.

7. Kenaikan Pangkat

Tabel 1 Kenaikan Pangkat

NO	NAMA	NIP	GOL LAMA	GOL BARU	KETERANGAN
1	Andarias P. Kolawi, SKM	197904162003121002	III b	III c	SK telah diterima
2	Yeremias Wonam, SKM	197602061997031003	III a	III b	SK telah diterima
3	Pius Tadi Rantetasak	197504152008011019	III a	III b	SK telah diterima

8. Kenaikan Gaji Berkala

Tabel 2 Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama	NIP	TMT KGB
1	Gumson Josua Tampubolon, SKM	198510172008011007'	01 Januari 2020
2	Pius Tandi Rantetasak	197504152008011019	01 Januari 2020
3	Eni Sartika Simanjuntak	198007142014072007	01 Januari 2020
4	Aan Hendra Sukma, SKM	197910112005021005	01 Februari 2020
5	Yeremias Wonam, SKM	197602061997031003	01 Maret 2020
6	Arwina Paramma, SKM	198205132006042002	01 Maret 2020
7	Penataria Sianipar, SE	197904212010122002	01 Desember 2020
8	Batseba Linda Imsula	198109122008122001	01 Desember 2020
9	Elprida Silalahi, SKM	198506292010122003	01 Desember 2020
10	Ns. Muhin Steven Imbiri, S.Kep	198803062010121001	01 Desember 2020

F. Sistematika Penulisan

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulis laporan, maksud dan tujuan penulisan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

5. Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun 2020, meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja

Uraian singkat tentang Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

b. Perjanjian Kinerja

Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja KKP Kelas III Merauke Tahun 2020.

c. Bab III

Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil

Pada bagian ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam pencapaian kinerja, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

d. Bab IV Kesimpulan

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Kelas III Merauke serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun depan.

e. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Form Pengukuran Kinerja (PK)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima tahun) secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tertuang di dalam Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024

1. Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024

Renstra Kementerian Kesehatan dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) Eselon I dan oleh Unit Pelaksana Tekhnis dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan berupaya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam RAK dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan tujuan program. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, RAK KKP Kelas III Merauke 2020-2024 telah menetapkan 7 indikator kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target indikator sasaran secara bertahap setiap tahun mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan elayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
6. Kinerja implementasi WBK Satker
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Adapun target yang harus dicapai dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1 Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024

SASARAN	NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SATKER	BASE LINE		TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	559917	448467	297332	326590	355698	384656	413614
			Jumlah kedatangan penumpang kapal/pesawat (DN)	202314	188631	100000	110000	120000	130000	140000
			Jumlah keberangkatan penumpang kapal/pesawat (DN)	230601	164484	100000	110000	120000	130000	140000
			Jumlah kedatangan penumpang kapal/pesawat (LN)	71	240	0	0	0	0	0
			Jumlah keberangkatan penumpang kapal/pesawat (LN)	71	173	0	0	0	0	0
			Jumlah Pelintas Batas yang masuk (WNA)	1870	2215	1000	1100	1200	1300	1400
			Jumlah Pelintas Batas yang keluar (WNI)	319	138	500	550	600	650	700
			Jumlah kedatangan ABK kapal/kru pesawat (DN)	41040	28219	34960	38456	41952	45448	48944
			Jumlah keberangkatan ABK kapal/kru pesawat (DN)	55720	42260	42286	46515	50743	54972	59200
			Jumlah kedatangan ABK kapal/kru pesawat (LN)	331	485	100	110	120	130	140
			Jumlah keberangkatan ABK kapal/kru pesawat (LN)	217	429	100	110	120	130	140
			Jumlah screening TB	665	641	550	550	650	650	650
			Jumlah screening HIV	395	536	500	500	550	550	550
			Jumlah screening Malaria	127	195	200	500	500	500	500
			Jumlah kedatangan kapal/pesawat (LN)	27	22	5	6	6	7	7
			Jumlah keberangkatan kapal/pesawat (LN)	21	33	5	6	6	7	7
			Jumlah kedatangan kapal/pesawat (DN)	5532	3100	4000	4400	4800	5200	5600
			Jumlah keberangkatan kapal/pesawat (DN)	7084	4460	5200	5720	6240	6760	7280
			Lingkungan	13412	12110	6502	6502	6502	6502	6502
			Barang	100	96	1424	1566	1709	1851	1994
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan		90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara		85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
4	Nilai kinerja anggaran		-	-	80	80	85	90	90	
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan		-	-	80%	90%	95%	95%	100%	
6	Kinerja implementasi WBK satker		-	-	70	75	80	85	85	
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL		-	-	45%	45%	50%	60%	65%	

2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamatan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dengan target yang harus dilaksanakan/dicapai

Sasaran strategi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke adalah meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dengan 7 (tujuh) indikator yang harus dilaksanakan dan dicapai . Adapun indikator dan target tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	297.332
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85 %
		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80 %
		6	Kinerja implementasi WBK Satker	70
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020 merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada akhir tahun 2019. Penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang setiap tahunnya di operasionalkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapat persetujuan anggaran. Penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020 telah disusun, di dokumentasikan dan ditetapkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada akhir tahun 2019 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2020. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020. Jumlah anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2020 sebesar **Rp. 12,182.878.000,-**.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan	297.332
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85 %
		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80 %
		6	Kinerja implementasi WBK Satker	70
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

Penetapan indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diukur secara kuantitatif dan kualitatif sebagai penentuan tercapainya tujuan organisasi. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke melaksanakan proses penetapan kinerja sebagai salah satu bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran target-target penetapan kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dituangkan pada dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke, diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam tercapainya kinerja setiap indikator. Faktor penghambat dan pendukung yang telah teridentifikasi kemudian dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang.

1, Capaian Kinerja Tahun 2020

Persentase Capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diperoleh dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tanggal 01 Juli 2020. Dari sasaran meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya. Adapun capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4 Target dan Capaian Kinerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Tahun 2020

NO	Indikator	Definisi Operasional Indikator	Tahun 2020			Cara hitung		
			Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja
	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar	Jumlah pemeriksaan orang					327.572	116,90%
		Jumlah pemeriksaan alat angkut					17.785	193,10%
		Jumlah pemeriksaan barang					1.312	92,13%
		Jumlah pemeriksaan lingkungan					6.502	100%
				297.332	353.171	118,78%	297.332	353.171
Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang					48	48	100%
	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada alat angkut					313	313	100%
	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada barang					11	11	100%
	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada lingkungan					32	31	96,88%
						404	403	99,75%
			90%	99,75%	110,83%			
Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Kelengkapan data surveilans					6	5	83,33%
	Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direpson kurang dari 24 kurajam					14	14	100%
	Penyusunan rencana kontijensi					2	2	100%
	Indeks pinjal ≤1					5	6	120%
	HI Perimeter =0					5	5	100%
	Tidak ditemukan larva anopheles					5	4	80%
	Kepadatan kecoa rendah					5	5	100%
	Kepadatan lalat ≤ 2					5	4	80%
	TTU memenuhi syarat					5	5	100%
	TPM laik hygiene					32	31	96,90%
	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan					5	5	100%
						89	86	96,63%
			85%	96,63%	113,68%			
4	Nilai kinerja anggaran	EMonev DJA	80	88	110,00%			
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan		80%	100%	125,00%			
6	Kinerja implementasi WBK satker	Penilaian Lembar kinerja Evaluasi satker	70	82,8	118,29%			
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pegawai yang ditingkatkan kemampuannya sesuai kompetensi (seminar, workshop, capacity building, on job training)	45%	51,70%	114,90%			
					115,93%			

a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

1. Defenisi Operasional

Jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun

2. Rumus/Cara perhitungan

Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara)

3. Capaian Indikator

Tabel. 5
Jumlah Pengawasan orang, barang, alat angkut dan lingkungan

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SATKER	TARGET	REALISASI TARGET REAL												JUM
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
orang	280.196	47.424	40.457	40.447	6.884	8.336	10.721	19.739	25.085	30.227	21.755	32.981	43.516	32
Jumlah kedatangan penumpang kapal/pesawat (DN)	100.000	18.758	15.317	13.921	51	118	735	5.650	7.825	9.871	9.250	11.652	16.121	10
Jumlah keberangkatan penumpang kapal/pesawat (DN)	100.000	19.753	16.691	15.973	68	125	788	6.217	9.378	9.668	3.790	11.496	17.269	11
Jumlah keberangkatan penumpang kapal/pesawat (LN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Jumlah Pelintas Batas yang masuk (WNA)	1.000	246	5	27	9	17	1	2	-	246	223	248	179	
Jumlah Pelintas Batas yang keluar((WNI)	500	27	3	4	18	16	-	-	-	27	93	175	148	
Jumlah kedatangan ABK kapal/kru pesawat (DN)	34.960	3.514	2.958	5.207	2.983	3.762	4.246	3.896	3.874	5.174	3.128	4.239	4.591	4
Jumlah keberangkatan ABK kapal/kru pesawat (DN)	42.286	5.081	5.365	5.295	3.755	4.298	4.153	3.811	3.908	5.125	5.233	4.721	5.201	5

Jumlah kedatangan ABK kapal/kru pesawat (LN)	100	-	19	-	-	-	21	20	-	-	19	-	3	
Jumlah keberangkatan ABK kapal/kru pesawat (LN)	100	19	19	-	-	-	21	20	-	-	19	-	3	
Jumlah screening TB	550	13	40	10	-	-	248	123	100	116	-	-		
Jumlah screening HIV	500	13	40	10	-	-	8	-	-	-	-	450		
Jumlah screening Malaria	200	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-		
alat angkut	9.210	810	939	1.417	1.450	1.138	1.424	1.441	1.047	2.196	1.945	1.903	2.075	1
Jumlah kedatangan kapal/pesawat (LN)	5	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	
Jumlah keberangkatan kapal/pesawat (LN)	5	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
Jumlah kedatangan kapal/pesawat (DN)	4.000	346	371	704	682	554	750	721	526	1.098	885	918	994	
Jumlah keberangkatan kapal/pesawat (DN)	5.200	463	566	713	768	584	672	718	521	1.097	1.058	985	1.079	
Lingkungan	6.502	528	983	955	620	348	416	381	449	378	494	677	273	
Lingkungan	6.502													
Pemasangan Perangkat	37	1	4	4	1	3	2	3	3	4	5	4	3	

Survei Vektor DBD	5.299	423	851	825	516	256	309	302	341	252	401	568	255	
Pengendalian Vektor DBD	12	1	2	2	0	0	0	1	1	1	-	2	2	
Pengendalian Vektor Malaria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Survei vektor Diare	45	2	5	4	4	3	4	3	5	5	3	5	2	
Pengendalian Vektor Diare	16	0	3	2	2	0	0	1	2	3	1	1	1	
TTU	82	11	13	5	4	4	4	1	7	15	8	6	4	
Pengawas Sarana Air Bersih	971	82	97	113	93	82	95	70	90	94	76	73	6	
Tempat Pengolahan Makanan	39	8	8	0	0	0	2	0	0	4	0	17	0	
Barang	1.424	156	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	156	
Barang (jenazah, sampel dan barang cargo)	1.424	156	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	156	
Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dengan hasil sertifikat PHQC,SSCEC	320.970	50.412	44.501	45.391	11.224	11.508	14.601	23.583	28.277	35.575	26.833	38.341	48.524	37

4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
 - a) Membuat jadwal kegiatan rutin per bulan
 - b) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap minggu
 - c) Berkoordinasi dengan lintas sektor dan pengguna jasa dalam hal tugas pengawasan dan pemeriksaan yang akan kita lakukan.
 - d) Membuat media komunikasi online untuk mempermudah komunikasi
5. Analisa Penyebab Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan orang, alat angkut, barang
 - a) Adanya jadwal petugas pemeriksa meskipun bisa berubah jam pelaksanaan
 - b) Koordinasi yang baik dengan mitra kerja terkait permohonan pemeriksaan
 - c) Adanya media komunikasi online untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna jasa
6. Kendala/masalah yang dihadapi
 - a) Jadwal kedatangan/keberangkatan kapal tidak menentu karena tergantung pada pasang surut air
 - b) Jadwal kedatangan/keberangkatan pesawat perintis tergantung kondisi cuaca di daerah Merauke
 - c) Adanya perbedaan data manifest dari agen pelayaran dengan hasil pengawasan yang dilakukan karena beberapa penumpang naik/turun tidak membeli tiket (tidak mampu)
 - d) Karena keterbatasan biaya, kurangnya fasyankes yang mendapat rekomendasi Dinkes untuk melayani rapid mengakibatkan penumpang tidak memiliki hasil rapid pada saat embarkasi.
7. Pemecahan Masalah
 - a) Menyiapkan team petugas clearance in/out yang standby untuk antisipasi kapal yang berubah sewaktu-waktu
 - b) Memberikan usul ke pihak Pemda Kab. Merauke (Dinkes) untuk menyiapkan rapid test gratis bagi masyarakat tidak mampu.

8. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 6

Realisasi anggaran indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan				
Rp 4.249.001.001.051	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan	Rp 70.953.000	Rp 70.195.000	Rp 58.000
4249.001.001.052	Sarana dan Prasarana	Rp 89.500.000	Rp 86.460.000	Rp 3.040.000
4249.001.001.054	Pelabuhan/ Bandara Sehat	Rp 11.751.000	Rp 4.990.000	Rp 6.761.000
4249.001.002.053	Pelayanan Kesehatan Situasi khusus Lainn	Rp 17.080.000	Rp 17.000.000	Rp 80.000
4249.001.004.051	Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Baran	Rp 167.520.000	Rp 167.510.000	Rp 10.000
4249.001.004.052	Pelayanan Kesehatan	Rp 263.000.000	Rp 262.830.190	Rp 169.810
4249.001.U21.100	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Rp 200.000	Rp 198.000	Rp 2.000
4249.001.U22.100	Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP	Rp 44.550.000	Rp 43.019.500	Rp 1.530.500
4249.001.U01.100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -
4249.001.U02.100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -
4249.001.U04.100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	Rp 9.600.000	Rp 9.562.000	Rp 38.000
4249.001.U06.100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di POS Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	Rp 24.000.000	Rp 6.850.000	Rp 17.150.000
4249.001.U10.100	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	Rp 259.310.000	Rp 258.150.000	Rp 1.160.000
4249.001.002.057	Pekan Olahraga Nasional	Rp 721.964.000	Rp 22.551.362	Rp 699.412.638
		Rp 1.679.628.000	Rp 949.516.052	Rp 729.411.948

$$CKi = \frac{378.770}{297.332} \times 100 \% = 127 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((1.679.628.000 \times 1,27) - 949.616.052)}{1.679.628.000 \times 1,1} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 55,48 \%$$

b. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

1. Defenisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)

2. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

3. Capaian Indikator

Tabel 7 Data Faktor Risiko yang Dikendalikan

Faktor Risiko	Jumlah Yang Diperiksa	Jumlah Faktor Risiko Yang Ditemukan	Jumlah Faktor Risiko Yang Dikendalikan	Persentase
Pemeriksaan Orang	324.793	48	48	100%
Pemeriksaan Alat Angkut	18.142	313	313	100%
Pemeriksaan Barang	3.734	11	11	100%
Pemeriksaan Lingkungan	6.502	32	31	96,90%
Total	353.171	404	403	99,75%

4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- a) Melakukan skrining penyakit secara rutin dan kontiniu di pintu masuk
- b) Memfasilitasi sarana dan prasarana (alat kesehatan dan bahan habis pakai) kesehatan untuk mendukung pemeriksaan pelaku perjalanan
- c) Presentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada lingkungan:
 - Pemasangan perangkap tikus
 - Survei, larvasida dan Pemberantasan Sarang Nyamuk
 - Pengendalian vektor DBD melalui fogging dan pengkabutan
 - IRS
 - Survei dan pengendalian vektor diare.
 - Edukasi kepada pemilik TPM
 - Desinfeksi ruangan terminal penumpang

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pengendalian faktor risiko di pintu masuk sebagai akibat dari adanya dukungan dari lintas sektor dan lintas program di wilayah kerja, sedangkan yang tidak bisa dikendalikan pada TPM karena kategori dari usaha makanan tersebut berupa kaki lima yang seharusnya tidak berada di dalam wilayah bandara akan tetapi karena adanya kebutuhan dari pekerja pangan dari pekerja di lingkungan bandara untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan kemampuan pekerja.

6. Kendala/masalah yang dihadapi

- a) Masalah yang dihadapi ialah bagaimana merelokasi warung kaki lima supaya tidak berada di wilayah bandara untuk mengurangi faktor risiko kepada pengguna jasa khususnya penumpang.
- b) Sehubungan dengan ruang VIP yang letaknya terpisah dari ruang kedatangan penumpang di bandara sehingga pengawasan harus dilakukan di dua tempat, sedangkan SDM terbatas
- c) Beberapa jenazah yang dikirim dari kabupaten lain dan transit di Merauke tidak memenuhi syarat pemetian

7. Pemecahan Masalah

- a) Menyampaikan permasalahan secara lisan kepada pihak pengelola bandara dalam rapat evaluasi bandara sehat.
- b) Menyampaikan usulan ke pihak UPBU dan Otoritas bandara agar semua penumpang yang datang dan berangkat harus melalui ruang kedatangan dan keberangkatan bandara.
- c) Melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai, dinas kesehatan, Rumah sakit dan fasyankes tentang tatacara pemetian jenazah yang akan diangkut

8. Efisiensi penggunaan sumber daya

- a) Pemeriksaan beberapa kapal dilakukan oleh petugas yang sama sehingga terjadi efisiensi penyerapan anggaran transport lokal
- b) Penggabungan kegiatan skrining HIV dan skrining malaria pada pergantian Satgas Pamtas
- c) Penggabungan kegiatan skrining Covid-19 dan skrining TB di pintu masuk
- d) Tindakan desinfeksi barang bawaan / bagasi penumpang dan alat angkut dilakukan secara mandiri oleh pihak Unit Pengelola Bandara (UPBU) sehingga mengurangi anggaran satker (belanja bahan dan transport lokal petugas)

Tabel 8
Realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan				
	4249.001.002.054	Tindakan pengendalian	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp -
	4249.001.U13.100	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan kategori 2	Rp 26.850.000	Rp 18.250.000	Rp 8.600.000
	4249.001.U14.100	Fooging	Rp 29.708.000	Rp 21.744.449	Rp 7.963.551
	4249.001.U16.100	Spraying	Rp 12.124.000	Rp 7.751.000	Rp 4.373.000
	4249.001.U17.100	Spraying IRS	Rp 7.398.000	Rp 7.353.000	Rp 45.000
	4249.001.004.056	Pengadaan alat/bahan pengendalian faktor resiko	Rp 537.560.000	Rp 523.699.114	Rp 13.860.886
		Jumlah	Rp 613.840.000	Rp 578.997.563	Rp 34.842.437

$$CKi = \frac{403}{404} \times 100 \% = 99,75 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((613.840.000 \times 0,99) - 578.997.563)}{613.840.000 \times 0,99} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 4,72 \%$$

c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

1. Defenisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

- a) Kelengkapan data surveilans
- b) Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam
- c) Penyusunan rencana kontijensi
- d) Indeks pinjal ≤ 1

Jumlah pinjal *xenopsyllah cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang diperiksa

- e) HI Perimeter = 0

Persentase rumah yang yang positif terdapat larva *aedes aegypti* / bangunan yang negatif larva

- f) Tidak ditemukan larva *anopheles*

Persentase habitat perkembangbiakan positif larva *Anopheles sp* / jumlah seluruh habitat yang diamati

g) Kepadatan kecoa rendah

Angka rata rata populasi kecoa pada wilayah yang di hitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam

h) Kepadatan lalat ≤ 2

Angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang di ukur dengan menggunakan flygrill

i) TTU memenuhi syarat

Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di wilayah Pelabuhan Bandara dan PLBD

j) TPM laik hygiene

Jumlah tempat pengolahan makanan yang laik hygiene sanitasi makanan di wilayah Pelabuhan, Bandara dan PLBD .

k) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan

Jumlah Sarana air bersih, dilingkungan Pelabuhan, Bandara, dan PLBD yang memenuhi syarat kesehatan.

2. Rumus/Cara perhitungan

Akumulasi persentase target dan capaian:

- 1) Kelengkapan data surveilans
- 2) Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam
- 3) Penyusunan rencana kontijensi
- 4) Indeks pinjal ≤ 1
- 5) HI Perimeter = 0
- 6) Tidak ditemukan larva anopheles
- 7) Kepadatan kecoa rendah
- 8) Kepadatan lalat ≤ 2
- 9) TTU memenuhi syarat
- 10) TPM laik hygiene
- 11) Kualitas air bersih memenuhi syarat

Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%

3. Capaian Indikator

1) Kelengkapan data surveilans

$$\frac{\text{Jumlah data surveilans}}{\text{jumlah target data surveilans}} \times 100 \%$$

$$\frac{5}{6} \times 100 \% = 83,3\%$$

- 2) Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam

$$\frac{\text{Jumlah SKD KLB yang direspon}}{\text{Jumlah SKD yang diterima}} \times 100 \%$$

$$\frac{14}{14} \times 100 \% = 100\%$$

- 3) Penyusunan rencana kontijensi

$$\frac{\text{Jumlah dokumen renkon yang dibuat}}{\text{Jumlah target dokumen renkon}} \times 100 \%$$

$$\frac{2}{2} \times 100 \% = 100\%$$

- 4) Indeks pinjal ≤ 1

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja yang bebas pinjal } \textit{xenopxillah cheopis}}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{6}{5} 100 \% = 120\%$$

- 5) HI Perimeter = 0

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja HI perimeter =0}}{\text{jumlah wilayah kerja}} \times 100 \%$$

$$\frac{5}{5} 100 \% = 100\%$$

- 6) Tidak ditemukan larva anopheles

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja yang bebas pinjal } \textit{xenopxillah cheopis}}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{4}{5} 100\% = 80\%$$

- 7) Kepadatan kecoa rendah

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja indeks populasi } < 2}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{5}{5} 100 \% = 100\%$$

- 8) Kepadatan lalat ≤ 2

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja indeks populasi } < 2}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{4}{5} 100 \% = 80$$

- 9) TTU memenuhi syarat

$$\frac{\text{Jumlah Wilker yang memiliki TTU yang memenuhi syarat}}{\text{jumlah Wilker}} 100 \%$$

$$\frac{5}{5} 100 \% = 100\%$$

10) TPM laik hygiene

$$\frac{\text{Jumlah TPM yang memenuhi syarat}}{\text{jumlah TPM yang diperiksa}} 100\%$$

$$\frac{31}{32} 100\% = 96.9\%$$

11) Kualitas air bersih memenuhi syarat

$$\frac{\text{Jumlah Wilker yang memiliki SAB memenuhi syarat}}{\text{jumlah Wilker}} 100\%$$

$$\frac{5}{5} 100\% = 100\%$$

Tabel 9
Persentase Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk
Negara

Indikator	Parameter	Target	Capaian	Persentase
Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Kelengkapan data surveilans	6	5	83,33%
	Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 kurajam	14	14	100%
	Penyusunan rencana kontijensi	2	2	100%
	Indeks pinjal ≤1	5	6	120%
	HI Perimeter =0	5	5	100%
	Tidak ditemukan larva anopheles	5	4	80%
	Kepadatan kecoa rendah	5	5	100%
	Kepadatan lalat ≤ 2	5	4	80%
	TTU memenuhi syarat	5	5	100%
	TPM laik hygiene	32	31	96,90%
	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	5	5	100%
	Jumlah		89	86

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan 11 parameter adalah 96,6%.

4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- a) Peningkatan SDM untuk melaksanakan kegiatan surveilans
- b) Membuat jejaring informasi dalam rangka cepat tanggap respon SKD KLB
- c) Melakukan review dokumen renkon minimal 2 tahun sekali (update informasi tugas dan tanggung jawab sesuai kesepakatan dalam dokumen renkon)
- d) Indeks Pinjal <1

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Indeks Pinjal tahun 2020 tidak ditemukan pinjal *Xenopxillah Cheopis* dan pinjal lainnya upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Edukasi kepada pemilik sarana dipelabuhan, Bandar Udara dan PLBN untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar
- Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- Pengangkutan sampah secara rutin setiap hari
- Melakukan pemasangan perangkap untuk mengendalikan populasi tikus

e) HI Perimeter = 0

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator HI Perimeter jentik *Aedes Aegypti* = 0, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan survei larva *Aedes Aegypti* secara rutin setiap bulan diwilayah perimeter dan buffer
- Melakukan larvasida dan PSN
- Melakukan edukasi kepada masyarakat, pengguna jasa dan lintas sektor diwilayah kerja KKP Merauke
- Melakukan pengendalian nyamuk dewasa (Fogging dan Pengkabutan)

f) Tidak ditemukan larva *anopheles*

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Survei larva *Anopheles* pada tempat perindukan terdapat satu wilayah kerja ditemukan habitat larva *anopheles*, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Suvei habitat larva *anopheles* dan nyamuk dewasa
- Melakukan IRS
- Memelihara ikan pemakan jentik

g) Kepadatan kecoak rendah

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kepadatan Kecoak tidak ditemukan angka kepadatan > 2, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Survei Kecoak
- Perbaiki sanitasi lingkungan

- Edukasi kepada masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan
 - Masyarakat dan pemilik sarana melakukan pengendalian kecoak secara mandiri
- h) Kepadatan lalat < 2
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kepadatan lalat adalah 80%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan survei vektor diare setiap bulan
 - Melakukan pengendalian untuk menekan populasi lalat
 - Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- i) TTU Memenuhi syarat
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TTU Memenuhi syarat adalah 100%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TTU
 - Berkoordinasi dengan stake holder untuk menyiapkan sarana dan prasaran TTU yang memenuhi syarat kesehatan
 - Pengguna TTU untuk memelihara dan menjaga kebersihan
- j) TPM Laik Hygiene
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TPM Laik Hygiene adalah 96.9%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TPM
 - Memberikan edukasi kepada pemilik Penjamah Makanan untuk menerapkan prinsip Hygiene sanitasi makanan
 - Menyarankan kepada pemilik dan pengelola untuk menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat.
- k) Kualitas air bersih memenuhi syarat
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Kualitas air bersih 100% memenuhi syarat, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan pemeriksaan secara rutin
 - Edukasi kepada pengelola untuk menyiapkan sara air bersih yang memenuhi syarat
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- a) Capaian indikator kinerja yang tercapai 100% yang terdiri dari dipengaruhi oleh penetapan target volume output kegiatan sesuai dengan sasaran kegiatan
 - b) Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lintas sector dan lintas program
 - c) Deseminasi informasi hasil kegiatan kepada instansi terkait.
 - d) Menyediakan media KIE di pintu masuk.

6. Kendala/masalah yang dihadapi

- a) Dengan adanya pandemi COVID-19 pemda kabupaten Merauke mengeluarkan himbauan/edaran pembatasan aktivitas sehingga kegiatan surveilans data penyakit dari Dinkes kabupaten Merauke tidak rutin diterima
- b) Dalam melakukan pengendalian vektor tidak semua masyarakat bersedia menerima tindakan *Indoor Residual Spraying*
- c) Kurangnya pengetahuan penjamah makanan tentang personal hygiene
- d) Sulitnya mendapatkan tenaga kader yang menetap sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan rutinitas tugas kader

7. Pemecahan Masalah

- a) Deseminasi data hasil surveilans menggunakan media online
- b) Informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk media KIE (leaflet, spanduk, banner)
- c) Merekrut tenaga kader baru, kemudian melatih cara melakukan survey vector

8. Efisiensi penggunaan sumber daya

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan tenaga kader yang konsisten sehingga tugas kader digantikan oleh pegawai KKP Merauke, hal ini menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran transport lokal kader.

Tabel 10

Realisasi anggaran indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara				
4249.001.002.055	Penyelidikan epidemiologi	Rp 58.293.000	Rp 56.162.500	Rp 2.130.500
4249.001.003.051	Penyusunan dokumen renkon	Rp 38.515.000	Rp 36.065.000	Rp 2.450.000
4249.001.004.054	Surveilans epidemiologi	Rp 10.082.000	Rp 3.481.000	Rp 6.601.000
Rp4.249.001.004.055	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	Rp 35.096.000	Rp 31.638.750	Rp 3.457.250
4249.001.U15.100	Pemetaan	Rp 3.816.000	Rp 3.273.385	Rp 542.615
4249.001.U15.101	Persiapan bahan dan alat	Rp 48.024.000	Rp 35.139.500	Rp 12.884.500
4249.001.U15.102	Pemasangan perangkap	Rp 93.576.000	Rp 90.157.088	Rp 3.418.912
4249.001.U15.103	Identifikasi tikus dan pinjal	Rp 1.440.000	Rp 1.427.500	Rp 12.500
4249.001.U18.100	Survei dan larvasida	Rp 50.040.000	Rp 40.416.000	Rp 9.624.000
4249.001.U19.100	Survei jentik	Rp 2.226.000	Rp 890.000	Rp 1.336.000
4249.001.U19.101	Survei nyamuk	Rp 68.040.000	Rp 67.780.800	Rp 259.200
4249.001.U20.100	Survei Vektor Diare	Rp 11.920.000	Rp 10.860.000	Rp 1.060.000
		Rp 421.068.000	Rp 377.291.523	Rp 43.776.477

$$CKi = \frac{86}{89} \times 100 \% = 96,6 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((421.068.000 \times 0,97) - 377.291.523)}{421.068.000 \times 0,97} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 7,63 \%$$

d. Nilai kinerja anggaran

1. Defenisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik

2. Rumus/Cara perhitungan

$$\frac{\text{Realisasi volume kegiatan}}{\text{target volume kegiatan}} \times \frac{\text{realisasi indikator kegiatan}}{\text{target indikator kegiatan Capaian Indikator}} \times 100 \%$$

3. Capaian indikator

$$= \frac{828}{880} \times \frac{840}{896} \times 100 \%$$

$$= 88 \%$$

Tabel 11 Capaian Keluaran Kegiatan

No	Nama Output	Target Volume Kegiatan (TVK)	Realisasi Volue Kegiatan (RVK)												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1,0000	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0837	1,0000
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1,0000	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0837	1,0000
3	Layanan Perkantoran (Layanan)	1,0000	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0837	1,0000
4	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk (layanan)	880,0000	107,0000	17,0000	34,0000	41,0000	33,0000	58,0000	27,0000	52,0000	175,0000	57,0000	78,0000	146,0000	825,0000

- d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
- 1) Perlunya perencanaan yang optimal
 - 2) Perlunya komitmen dalam melaksanakan kegiatan setiap bulan (sesuai dengan Rencana Penarikan dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan)
 - 3) Melaksanakan evaluasi kegiatan setiap bulan
 - 4) Menindaklanjuti permasalahan/kendala dari hasil evaluasi kegiatan
- e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- Penyebab kegagalan realisasi/serapan anggaran tidak mencapai 100 % karena :
- 1) Pandemi Covid mengakibatkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan
 - 2) Edaran/himbauan Pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan Satuan Gugus Tugas Kabupaten Merauke yang membatasi kegiatan
 - 3) Bulan Maret s/d Mei 2020 pintu masuk Pelabuhan dan Bandara ditutup (lockdown)
 - 4) Bulan Maret s/d Desember 2020 pintu masuk Pos Lintas Batas darat ditutup
- f. Kendala/masalah yang dihadapi
- 1) Terdapat belanja modal senilai Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak terealisasi karena rekanan pemegang tender tidak dapat menyediakan mobil ambulance sesuai dengan spek yang telah ditentukan sehingga dilakukan pembatalan kontrak kerjasama
 - 2) Terdapat sisa belanja gaji karena pada tahun 2020 ada 3 (tiga) orang pegawai yang memasuki masa purnabakti pada bulan Januari dan Februari
- g. Pemecahan Masalah
- 1) Perlunya perencanaan yang optimal
 - 2) Menentukan spek barang yang akan diadakan melalui tender memperhatikan kebutuhan ketersediaan di lapangan
- h. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 12

Realisasi Anggaran Indikator Nilai Kinerja Anggaran

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
Nilai kinerja anggaran				
2063.970.052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp 550.452.000	Rp 540.672.143	Rp 9.779.857
2063.970.051	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	Rp 53.415.000	Rp 51.186.698	Rp 2.228.302
2063.994.001	Gaji dan tunjangan	Rp 4.319.772.000	Rp 3.818.833.271	Rp 500.938.729
2063.994.002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp 2.657.367.000	Rp 2.418.612.695	Rp 238.754.305
2063.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	Rp 1.090.000.000	Rp 400.000.000	Rp 690.000.000
		Rp 8.671.006.000	Rp 7.229.304.807	Rp 1.441.701.193

$$CKi = \frac{88}{80} \times 100 \% = 110 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((8.671.006.000 \times 1,1) - 7.229.304.807)}{8.671.006.000 \times 1,1} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 24,20 \%$$

5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

a. Defenisi Operasional

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Rekonsiliasi keuangan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN - Daerah menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web yang disebut e-Rekon&LK. Selain untuk rekonsiliasi, aplikasi e-Rekon&LK digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA-W, tingkat UAPPA-EI, dan tingkat UAPA (K/L). Hal tersebut dimungkinkan dengan penerapan single database pada aplikasi e-Rekon&LK, sehingga satker cukup melakukan pengunggahan ADK dari aplikasi SAIBA ke aplikasi e-Rekon&LK, maka secara sistem akan dijalankan proses rekonsiliasi sekaligus proses penggabungan data laporan keuangan unit pelaporan di atasnya. Data Laporan Keuangan yang diunggah oleh satker merupakan data yang sama untuk menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W hingga tingkat UAPA. Oleh karena itu, PA/KPA bertanggung jawab atas data yang ada pada aplikasi e-Rekon&LK. Rekonsiliasi dimulai dengan mengunggah ADK ke aplikasi e-Rekon&LK yang dilakukan pada saat masa pengunggahan (open period). Proses rekonsiliasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dilaksanakan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Apabila tanggal 14 jatuh pada hari libur /yang diliburkan, rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Namun, dalam kondisi tertentu yang disebabkan antara lain:

- Kebijakan libur / cuti nasional;
- Kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan unaudited, dan tahunan audited; dan/ atau
- Permasalahan sistem

b. Rumus/Cara perhitungan

$$\text{Presentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LK Bulanan} = \frac{\sum \text{Total Skor Berdasarkan Parameter}}{\sum \text{Total Parameter}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase tingkat kepatuhan penyampaian LK Bulanan} = \frac{500}{5} \times 100 \%$$

$$\text{Presentase tingkat kepatuhan penyampaian LK Bulanan} = 100 \%$$

- d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
- 1) Melakukan ketepatan waktu upload dengan mengunggah ADK ke aplikasi e-Rekon&LK, dilaksanakan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya
 - 2) Hasil rekon tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK)
 - 3) Tidak ada perbedaan rekonsiliasi internal SAK dengan SIMAK BMN
 - 4) Meminimalisir jumlah upload (dibawah atau sama dengan 5 kali upload)
- e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- Analisa penyebab keberhasilan kepatuhan penyampaian LK Bulanan adalah :
- 1) SDM yang disiplin dalam melaksanakan input data dan upload data
 - 2) Komitmen yang tinggi untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel, disusun dan disajikan dengan basis akrual
- f. Kendala/masalah yang dihadapi
- 1) Jaringan internet yang kurang mendukung sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan upload ADK
 - 2) Rekon eksternal antara SIMAK BMN dan SAIBA terdapat persediaan yang belum diregister
 - 3) Keterlambatan pengiriman ADK dropping Pusat ke Satker sehingga mengakibatkan rekon eksternal antara SIMAK BMN dan SAIBA dan meakukan rekon ulang internal (Upload ADK di aplikasi erekon)
- g. Pemecahan Masalah
- 1) Meningkatkan disiplin dan komitmen petugas penanggungjawab pengelola/operator SIMAK BMN dan SAIBA
 - 2) Mengevaluasi SOP rekon eksternal SIMAK BMN dan SAIBA
- h. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 14

Realisasi anggaran persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan				
2063.970.053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp 134.058.000	Rp 79.088.200	Rp 54.969.800
		Rp 134.058.000	Rp 79.088.200	Rp 54.969.800

$$CKi = \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((134.058.000 \times 1,25) - 70.088.200)}{134.058.000 \times 1,25} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 58,17 \%$$

6. Kinerja implementasi WBK satker

a. Defenisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P. Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

b. Rumus/Cara perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil

Terdapat Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Penilaian terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu

1) Komponen pengungkit (60%)

- Manajemen perubahan (8%)
- Penataan tata laksana (7%)
- Penataan Sistem Manajemen SDM (10%)
- Penguatan akuntabilitas (10 %)
- Penguatan pengawasan(15 %)
- Peningkatan kualitas pelayanan public

- 2) Komponen hasil (40 %)
 - Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (20%)
 - Kualitas pelayanan publik (20%)

c. Capaian Indikator

Nilai hasil evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 adalah **82,8** dengan rincian penilaian :

1) Komponen pengungkit : **48,87**

- Manajemen perubahan : 8
- Penataan tata laksana : 3,95
- Penataan Sistem Manajemen SDM : 9,30
- Penguatan akuntabilitas : 8,96
- Penguatan pengawasan : 13,45
- Peningkatan kualitas pelayanan publik : 5,21

2) Komponen hasil : **33,93**

- Pemerintah yang bersih dan bebas dan bebas dari KKN : 19,18
- Kualitas pelayanan publik : 14,75

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Melakukan evaluasi kegiatan setiap pokja WBK secara teratur setiap bulan dengan melibatkan semua tim WBK
- 2) Membuat kesepakatan upaya tindak lanjut dari hasil assessment eselon 1 dan assessment Inspektorat Jenderal kemenkes RI
- 3) Melakukan advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK
- 4) Mengalokasikan anggaran pelatihan peningkatan pelayanan publik
- 5) Pembuatan media KIE tentang informasi Tolak Gratifikasi

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator dalam melaksanakan Kinerja Implementasi WBK disebabkan oleh beberapa upaya dan strategi, antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi kegiatan setiap pokja WBK
- 2) Adanya kesepakatan upaya tindak lanjut dari hasil assessment eselon 1 dan assessment Inspektorat Jenderal kemenkes RI
- 3) Melakukan advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK
- 4) Melakukan pelatihan peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan dana satker

- 5) Tersedianya anggaran dalam membuat media KIE tentang informasi WBK satker
- f. Kendala/masalah yang dihadapi
 - 1) Belum semua pegawai terpapar tentang informasi Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
 - 2) Belum optimalnya komitmen bersama dalam menegakkan upaya Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
 - 3) Beberapa pegawai yang menjadi anggota Pokja WBK berada di wilayah kerja dengan kondisi sulit jaringan internet
- g. Pemecahan Masalah
 - 1) Melakukan pelatihan tentang peningkatan pelayanan publik
 - 2) Meningkatkan koordinasi antara tim Pokja WBK
 - 3) Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua pegawai tentang implementasi WBK
 - 4) Mendistribusikan media KIE tentang implementasi WBK ke wilayah kerja
- h. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 15

Realisasi anggaran indikator kinerja implementasi WBK Satker

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
Kinerja implementasi WBK satker				
2063.970.055	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	Rp 386.059.000	Rp 356.339.506	Rp 29.719.494
		Rp 386.059.000	Rp 356.339.506	Rp 29.719.494

$$CKi = \frac{82,8}{70} \times 100 \% = 118,3 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((386.059.000 \times 1,18) - 356.339.506)}{386.059.000 \times 1,183} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 21,98 \%$$

7. Persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 20 JPL dalam satu tahun

a. Defenisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh jam pelajaran) dalam satu tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional

b. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi seluruh jumlah seluruh ASN dikali 100 %

c. Capaian Indikator

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL = $\frac{15}{29} \times 100 \%$

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL = 51,72 %

Tabel. 16 Persentase Peningkatan Kapasitas ASN

No	Nama	Pelatihan klasikal/ non klasikal							Jumlah JP dalam 1 tahun	Pemenuhan 20 JPL Pengembangan Kompetensi pertahun
		Tugas Belajar	Pelatihan Teknis	Seminar / Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi	Bimbingan di tempat kerja		
1	Aan Hendra Sukma, SKM							5	5	Tidak terpenuhi
2	Afrina Musfiraa								-	Tidak terpenuhi
3	Andarias Paskawanto Kolawil, SKM		50				5		55	Terpenuhi
4	Arwina Paramma, SKM						20		20	Terpenuhi
5	Batseba Linda Imsula								-	Tidak terpenuhi
6	Bertha Tangke, BSc						5		5	Tidak terpenuhi
7	Delifour Bekia BR.Hutagaol, SKM						20		20	Terpenuhi
8	Diana Beatrix Samon					5			5	Tidak terpenuhi
9	dr. Andi Farida		20				10		30	Terpenuhi
10	dr. Bambang Budiman						20		20	Terpenuhi
11	dr. Ika Juwita		40						40	Terpenuhi
12	dr. Maryam Wangguway						5		5	Tidak terpenuhi
13	Elprida Silalahi, SKM								-	Tidak terpenuhi
14	Eni Sartika Simanjuntak						20		20	Terpenuhi

15	Feri Henos Rerey, SKM								-	Tidak terpenuhi
16	Gumson Josua Tampubolon, SKM	20					5		25	Terpenuhi
17	Johlwis Tamalonggehe		50			5		5	60	Terpenuhi
18	Lilik Nur Kholidah						20		20	Terpenuhi
19	Martina Paulina Toker								-	Tidak terpenuhi
20	Ns. Muhin Steven Imbiri, S.Kep							5	5	Tidak terpenuhi
21	Oktavia Marindatu, SKM						5		5	Tidak terpenuhi
22	Penataria Sianipar, SE						20		20	Terpenuhi
23	Pius Tandi Rantetasak							5	5	Tidak terpenuhi
24	Rika Pratiwi						20		20	Terpenuhi
25	Rosjunaida Malau, SE						20		20	Terpenuhi
26	Sutrisno, S.Sos						20		20	Terpenuhi
27	Tri Nindi Gaib								-	Tidak terpenuhi
28	Yeremias Wonam, SKM								-	Tidak terpenuhi
29	Yulianti Lande, S.Si, Apt		40				5		45	Terpenuhi

- d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1. Merencanakan dan menganggarkan peningkatan SDM setiap tahun
 2. Melakukan bimbingan teknis di wilayah kerja
 3. Meningkatkan kemampuan pegawai untuk belajar mandiri
- e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- Penyebab keberhasilan dari indikator peningkatan kapasitas SDM adalah :
1. Tersedianya anggaran untuk upaya peningkatan SDM
 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pegawai untuk meningkatkan SDM
- f. Kendala/masalah yang dihadapi
1. Perencanaan anggaran yang direncanakan untuk upaya peningkatan SDM tidak terpenuhi
 2. Upaya peningkatan SDM dalam bentuk e-learning terkadang terhambat oleh jaringan internet yang tidak memadai terutama bagi pegawai yang bertugas di wilayah kerja
- g. Pemecahan Masalah
1. Pejabat struktural rutin melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis di wilayah kerja
 2. Pejabat struktural dapat menjadi coaching di kantor dengan tujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas SDM
 3. Membuat perencanaan peningkatan ASN setiap tahun
- a. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 17 Realisasi anggaran indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 17 JPL

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL				
2063.970.054	Pengelolaan kepegawaian	Rp 212.969.000	Rp 167.545.356	Rp 45.423.644
4249.001.004.053	Peningkatan Kualitas SDM	Rp 21.240.000	Rp 11.104.900	Rp 10.135.100
4249.001.001.053	Peningkatan kualitas SDM teknis	Rp 43.540.000	Rp 39.573.288	Rp 4.136.712
		Rp 277.749.000	Rp 218.223.544	Rp 59.695.456

$$CKi = \frac{51,7}{45} \times 100 \% = 114,9 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((277.749.000 \times 1,15) - 218.223.544)}{277.749.000 \times 1,15} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 31,68 \%$$

2. Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 18 Capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

NO	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	116.502	158.780	136,29%	515.502	593.358	115,10%	297.332	353.171	118,78%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	111	111	100,00%	87	87	100,00%	90%	99,75%	110,83%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	-	-	-	-	-	-	85%	96,60%	113,65%
4	Nilai kinerja anggaran	100	100	100,00%	100	100	100,00%	80	88	110,00%
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	80%	100%	125,00%
6	Kinerja implementasi WBK satker	-	-	-	-	-	-	70	82,8	118,29%
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	-	-	-	-	-	-	45%	51,70%	114,89%
	Jumlah capaian rata-rata									115,93%

Dari tabel dapat dilihat bahwa semua target yang telah ditetapkan di tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat mencapai/melebihi 100 %, hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, hal ini tentunya ditunjang oleh anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

3. Capaian Kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang

Tabel 19 Capaian Kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang

NO	Indikator	KKP Kelas III Merauke			KKP Kelas III Kupang		
		Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	297.332	353.171	118,78%	33.461	17.866.118	53393,86%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	99,75%	110,83%	100%	100%	100,00%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85%	96,60%	113,65%	85%	76,00%	89,41%
4	Nilai kinerja anggaran	80	100	125,00%	80	83,7	104,63%
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	100%	125,00%	80%	100%	125,00%
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	82,8	118,29%	70	72	102,86%
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	51,70%	114,89%	45%	48,00%	106,67%
	Jumlah capaian rata-rata			118.06 %			7642,74%

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang karena kedua KKP tersebut memiliki tingkat kelas dan 3 (tiga) wilayah kerja yang sama yaitu wilayah kerja Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Negara. Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke semuanya melebihi 100 % sedangkan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai 100 % yaitu indikator indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara. Anggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sebesar Rp. 12.182.878,- sedangkan anggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang sebesar Rp. 15.594.789.000,-, Anggaran di Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang lebih besar dari Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke karena Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang memiliki lebih banyak wilayah kerja (17 wilayah kerja).

B. SUMBER DAYA ANGGARAN

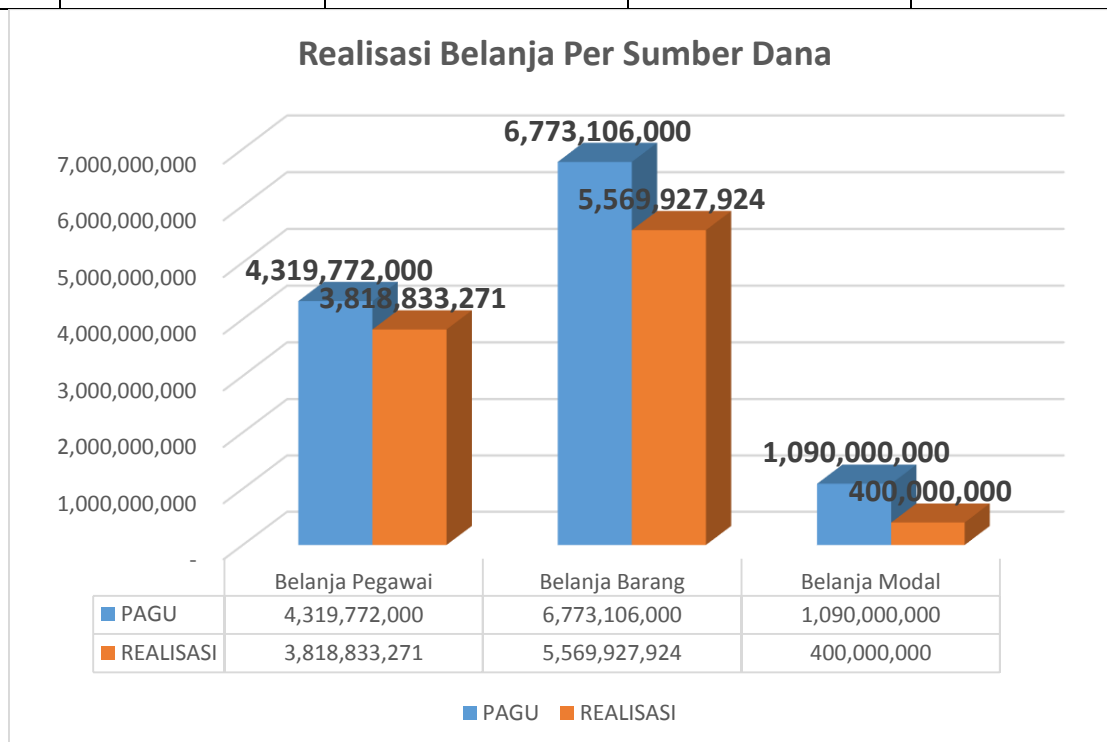
Berdasarkan DIPA No. 024.05.2.416057/2020 tanggal 12 November 2019 Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Rp. 12,182.878.000,- dengan rincian :

- Rupiah murni : Rp. 11.916.278.000,-
- PNBP (80%) : Rp. 266.600.000,-

1. Realisasi Belanja Per Sumber Dana

Tabel 20 Realisasi Belanja Per Sumber Dana

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.319,772.000	Rp. 3.818.833.271	88,40 %
2	Belanja Barang	Rp. 6.773.106.000	Rp. 5.569.927.924	82,24 %
3	Belanja Modal	Rp. 1.090.000.000	Rp. 400.000.000	36,70 %
	Persentase Keseluruhan			80,35 %

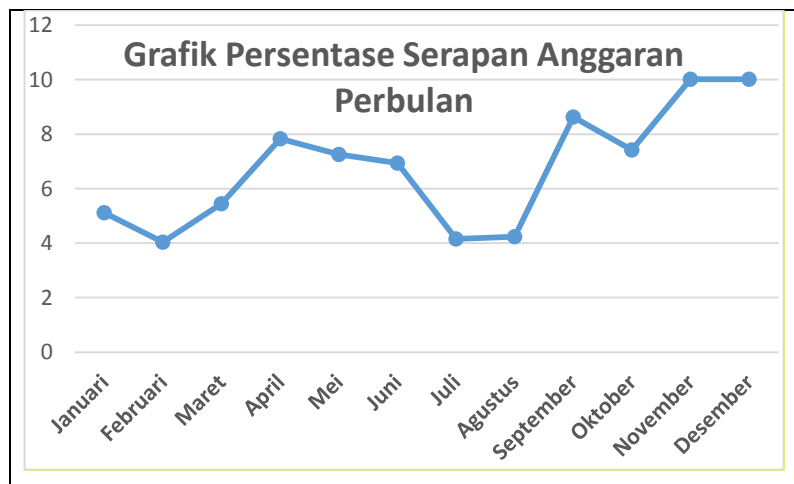


Grafik Realisasi Belanja Per Sumber Dana

2. Persentase Serapan Anggaran Perbulan

Tabel 21 Serapan Anggaran Perbulan

No	Bulan	Persentase Serapan (%)
1	Januari	5,12
2	Februari	4,04
3	Maret	5,45
4	April	7,83
5	Mei	7,25
6	Juni	6,94
7	Juli	4,16
8	Agustus	4,24
9	September	8,63
10	Oktober	7,42
11	November	10,01
12	Desember	10,01



Grafik Persentase serapan anggaran perbulan

3. Realisasi Permasing-masing Indikator

Tabel 22 Realisasi Permasing-masing Indikator

NO	KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI		SISA
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan					
	Rp4.249.001.001.051	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan	Rp 70.953.000	Rp 70.195.000	Rp 58.000	
	4249.001.001.052	Sarana dan Prasarana	Rp 89.500.000	Rp 86.460.000	Rp 3.040.000	
	4249.001.001.054	Pelabuhan/ Bandara Sehat	Rp 11.751.000	Rp 4.990.000	Rp 6.761.000	
	4249.001.002.053	Pelayanan Kesehatan Situasi khusus Lainnya	Rp 17.080.000	Rp 17.000.000	Rp 80.000	
	4249.001.004.051	Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang	Rp 167.520.000	Rp 167.510.000	Rp 10.000	
	4249.001.004.052	Pelayanan Kesehatan	Rp 263.000.000	Rp 262.830.190	Rp 169.810	
	4249.001.U21.100	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Rp 200.000	Rp 198.000	Rp 2.000	
	4249.001.U22.100	Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP	Rp 44.550.000	Rp 43.019.500	Rp 1.530.500	
	4249.001.U01.100	Layanan Keekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -	
	4249.001.U02.100	Layanan Keekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of)	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -	
	4249.001.U04.100	Layanan Keekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	Rp 9.600.000	Rp 9.562.000	Rp 38.000	
	4249.001.U06.100	Layanan Keekarantinaan Kesehatan di POS Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	Rp 24.000.000	Rp 6.850.000	Rp 17.150.000	
	4249.001.U10.100	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	Rp 259.310.000	Rp 258.150.000	Rp 1.160.000	
	4249.001.002.057	Pekan Olahraga Nasional	Rp 721.964.000	Rp 22.551.362	Rp 699.412.638	
			Rp 1.679.628.000	Rp 949.516.052	Rp 729.411.948	
				56,53%		
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan					
	4249.001.002.054	Tindakan pengendalian	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp -	
	4249.001.U13.100	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan kategori 2	Rp 26.850.000	Rp 18.250.000	Rp 8.600.000	
	4249.001.U14.100	Fooging	Rp 29.708.000	Rp 21.744.449	Rp 7.963.551	
	4249.001.U16.100	Spraying	Rp 12.124.000	Rp 7.751.000	Rp 4.373.000	
	4249.001.U17.100	Spraying IRS	Rp 7.398.000	Rp 7.353.000	Rp 45.000	
	4249.001.004.056	Pengadaan alat/bahan pengendalian faktor resiko	Rp 537.560.000	Rp 523.699.114	Rp 13.860.886	
		Jumlah	Rp 613.840.000	Rp 578.997.563	Rp 34.842.437	
				94,32%		
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara					
	4249.001.002.055	Penyelidikan epidemiologi	Rp 58.293.000	Rp 56.162.500	Rp 2.130.500	
	4249.001.003.051	Penyusunan dokumen renkon	Rp 38.515.000	Rp 36.065.000	Rp 2.450.000	
	4249.001.004.054	Surveilans epidemiologi	Rp 10.082.000	Rp 3.481.000	Rp 6.601.000	
	Rp4.249.001.004.055	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan	Rp 35.096.000	Rp 31.638.750	Rp 3.457.250	
	4249.001.U15.100	Pemetaan	Rp 3.816.000	Rp 3.273.385	Rp 542.615	
	4249.001.U15.101	Persiapan bahan dan alat	Rp 48.024.000	Rp 35.139.500	Rp 12.884.500	
	4249.001.U15.102	Pemasangan perangkat	Rp 93.576.000	Rp 90.157.088	Rp 3.418.912	
	4249.001.U15.103	Identifikasi tikus dan pinjal	Rp 1.440.000	Rp 1.427.500	Rp 12.500	
	4249.001.U18.100	Survei dan larvasida	Rp 50.040.000	Rp 40.416.000	Rp 9.624.000	
	4249.001.U19.100	Survei jentik	Rp 2.226.000	Rp 890.000	Rp 1.336.000	
	4249.001.U19.101	Survei nyamuk	Rp 68.040.000	Rp 67.780.800	Rp 259.200	
	4249.001.U20.100	Survei Vektor Diare	Rp 11.920.000	Rp 10.860.000	Rp 1.060.000	
			Rp 421.068.000	Rp 377.291.523	Rp 43.776.477	
				89,60%		
4	Nilai kinerja anggaran					
	2063.970.052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp 550.452.000	Rp 540.672.143	Rp 9.779.857	
	2063.970.051	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	Rp 53.415.000	Rp 51.186.698	Rp 2.228.302	
	2063.994.001	Gaji dan tunjangan	Rp 4.319.772.000	Rp 3.818.833.271	Rp 500.938.729	
	2063.994.002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp 2.657.367.000	Rp 2.418.612.695	Rp 238.754.305	
	2063.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	Rp 1.090.000.000	Rp 400.000.000	Rp 690.000.000	
			Rp 8.671.006.000	Rp 7.229.304.807	Rp 1.441.701.193	
				83,37%		
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan					
	2063.970.053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp 134.058.000	Rp 79.088.200	Rp 54.969.800	
			Rp 134.058.000	Rp 79.088.200	Rp 54.969.800	
				59,00%		
6	Kinerja implementasi WBK satker					
	2063.970.055	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	Rp 386.059.000	Rp 356.339.506	Rp 29.719.494	
			Rp 386.059.000	Rp 356.339.506	Rp 29.719.494	
				92,30%		
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL					
	2063.970.054	Pengelolaan kepegawaian	Rp 212.969.000	Rp 167.545.356	Rp 45.423.644	
	4249.001.004.053	Peningkatan Kualitas SDM	Rp 21.240.000	Rp 11.104.900	Rp 10.135.100	
	4249.001.001.053	Peningkatan kualitas SDM teknis	Rp 43.540.000	Rp 39.573.288	Rp 4.136.712	
			Rp 277.749.000	Rp 218.223.544	Rp 59.695.456	
				78,57%		
	Jumlah		Rp 12.183.408.000	Rp 9.788.761.195	Rp 2.394.116.805	
				80,35%		

yang dialokasikan pada setiap indikator tidak terserap 100 %, akan tetapi dari output kegiatan setiap indicator, capaian target yang diperoleh melebihi 100 % sehingga terjadi efisiensi sumber daya :

- a. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 55,48 %
- b. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan sebesar 4,72 %
- c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara sebesar 7,63 % %
- d. Nilai kinerja anggaran sebesar 24,20 %
- e. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 58,17 %
- f. Kinerja implementasi WBK Satker sebesar 21,98 %
- g. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 31,69 %

4. Realisasi Pelayanan Output

Tabel 23 Realisasi Pelayanan Output

NO	KODE	URAIAN	TARGET		PAGU	REALISASI	SISA
1	2063.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	1 Layanan	1	Rp 1.090.000.000	Rp 400.000.000	Rp 690.000.000
2	2063.970.051	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	1 Layanan		Rp 53.415.000	Rp 51.186.698	Rp 2.228.302
3	2063.970.052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			Rp 550.452.000	Rp 540.672.143	Rp 9.779.857
4	2063.970.053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan			Rp 134.058.000	Rp 79.088.200	Rp 54.969.800
5	2063.970.054	Pengelolaan kepegawaian			Rp 212.969.000	Rp 167.545.356	Rp 45.423.644
6	2063.970.055	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			Rp 386.059.000	Rp 356.339.506	Rp 29.719.494
					Rp 2.426.953.000		Rp 832.121.097
7	2063.994.001	Gaji dan tunjangan	1 Layanan	1	Rp 4.319.772.000	Rp 3.818.833.271	Rp 500.938.729
8	2063.994.002	Operasional dan pemeliharaan kantor			Rp 2.657.367.000	Rp 2.418.612.695	Rp 238.754.305
					Rp 6.977.139.000		Rp 739.693.034
9	4249.001.001.051	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan	880 Layanan	1	Rp 70.953.000	Rp 70.195.000	Rp 58.000
10	4249.001.001.052	Sarana dan Prasarana		1	Rp 89.500.000	Rp 86.460.000	Rp 3.040.000

11	4249.001.001.053	Peningkatan kualitas SDM teknis
12	4249.001.001.054	Pelabuhan/ Bandara Sehat
13	4249.001.002.053	Pelayanan Kesehatan Situasi khusus Lainnya
14	4249.001.002.054	Tindakan pengendalian
15	4249.001.002.055	Penyelidikan epidemiologi
16	4249.001.002.057	Pekan Olahraga Nasional
17	4249.001.003.051	Penyusunan dokumen renkon
18	4249.001.004.051	Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang,
19	4249.001.004.052	Pelayanan Kesehatan
20	4249.001.004.053	Peningkatan Kualitas SDM
21	4249.001.004.054	Surveilans epidemiologi
22	4.249.001.004.055	Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
	4249.001.004.056	Pengadaan alat/bahan pengendalian faktor resiko
23	4249.001.U01.100	Layanan Kekeantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC

1	Rp 43.540.000	Rp 39.573.288	Rp 4.136.712
1	Rp 11.751.000	Rp 4.990.000	Rp 6.761.000
1	Rp 17.080.000	Rp 17.000.000	Rp 80.000
1	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp -
1	Rp 58.293.000	Rp 56.162.500	Rp 2.130.500
2	Rp 721.964.000	Rp 22.551.362	Rp 699.412.638
1	Rp 38.515.000	Rp 36.065.000	Rp 2.450.000
1	Rp 167.520.000	Rp 167.510.000	Rp 10.000
1	Rp 263.000.000	Rp 262.830.190	Rp 169.810
1	Rp 21.240.000	Rp 11.104.900	Rp 10.135.100
1	Rp 10.082.000	Rp 3.481.000	Rp 6.601.000
1	Rp 35.096.000	Rp 31.638.750	Rp 3.457.250
	Rp 537.560.000	Rp 523.699.114	Rp 13.860.886
7 2	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -

24	4249.001.U02.100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	15	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -
25	4249.001.U04.100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	16	Rp 9.600.000	Rp 9.562.000	Rp 38.000
26	4249.001.U06.100	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di POS Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	30	Rp 24.000.000	Rp 6.850.000	Rp 17.150.000
27	4249.001.U10.100	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	203	Rp 259.310.000	Rp 258.150.000	Rp 1.160.000
28	4249.001.U13.100	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan kategori 2	30	Rp 26.850.000	Rp 18.250.000	Rp 8.600.000
29	4249.001.U14.100	Fooging	28	Rp 29.708.000	Rp 21.744.449	Rp 7.963.551
30	4249.001.U15.100	Pemetaan	1	Rp 3.816.000	Rp 3.273.385	Rp 542.615
31	4249.001.U15.101	Persiapan bahan dan alat	1	Rp 48.024.000	Rp 35.139.500	Rp 12.884.500
32	4249.001.U15.102	Pemasangan perangkat	69	Rp 93.576.000	Rp 90.157.088	Rp 3.418.912
33	4249.001.U15.103	Identifikasi tikus dan pinjal	1	Rp 1.440.000	Rp 1.427.500	Rp 12.500
34	4249.001.U16.100	Spraying	28	Rp 12.124.000	Rp 7.751.000	Rp 4.373.000

35	4249.001.U17.100	Spraying IRS	6	Rp 7.398.000	Rp 7.353.000	Rp 45.000
36	4249.001.U18.100	Survei dan larvasida	2 5 2	Rp 50.040.000	Rp 40.416.000	Rp 9.624.000
37	4249.001.U19.100	Survei jentik	1	Rp 2.226.000	Rp 890.000	Rp 1.336.000
38	4249.001.U19.101	Survei nyamuk	4 1	Rp 68.040.000	Rp 67.780.800	Rp 259.200
39	4249.001.U20.100	Survei Vektor Diare	5 6	Rp 11.920.000	Rp 10.860.000	Rp 1.060.000
40	4249.001.U21.100	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	5	Rp 200.000	Rp 198.000	Rp 2.000
41	4249.001.U22.100	Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP	1 0	Rp 44.550.000	Rp 43.019.500	Rp 1.530.500
T O T A L				Rp 12.183.408.000	Rp 9.788.761.195	Rp 2.394.116.805
80,35%						

5. Penjelasan realisasi yang tidak mencapai target

Dari realisasi anggaran berdasarkan layanan output ada beberapa yang tidak terealisasi anggarannya, yaitu :

a. Pengadaan kendaraan bermotor

PPK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke telah melakukan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan membatalkan kontrak kerja pengadaan kendaraan ambulance senilai Rp 686.656.624,- dengan pihak pemenang tender PT Pauli Persada pada bulan November. Hal ini disebabkan karena sampai akhir November tidak ada progress pengadaan kendaraan ambulance.

b. Penyusunan rencana program dan rencana anggaran

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 54.969.800, salah satunya merupakan anggaran Belanja Perjalanan Biasa, hal ini disebabkan karena kegiatan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 dilakukan secara virtual

c. Pengelolaan kepegawaian

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 45.423.644, salah satunya merupakan anggaran belanja perjalanan biasa, hal ini disebabkan karena tidak ada CPNS yang diterima/lolos ujian formasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sehingga anggaran Perjalanan Dinas CPNS tahun 2020 tidak digunakan

d. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 29.719.494, salah satunya merupakan anggaran belanja perjalanan biasa, hal ini disebabkan karena selama pandemi Covid tidak ada pelaksanaan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga anggaran perjalanan biasa tidak digunakan

e. Gaji dan tunjangan

Terdapat sisa anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 500.938.729, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang pensiun pada awal bulan Januari dan Februari.

f. Operasional dan pemeliharaan kantor

g. Terdapat sisa anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp. 238.754.305, diantaranya adalah anggaran belanja langganan daya dan jasa, sisa honor keamanan/pramubakti, sopir dan kebersihan, belanja biaya peralatan dan mesin. Hal ini disebabkan karena perencanaan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor tidak dihitung dengan baik sehingga terjadi kelebihan anggaran.

h. Terdapat sisa anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) sebesar Rp. 699.412.638,

hal ini disebabkan ditundanya kegiatan PON tahun 2020 ke tahun 2021

- i. Terdapat sisa anggaran surveilans epidemiolog sebesar Rp. 6.601.000, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid dan dari pihak Pemda Kabupaten Merauke mengeluarkan himbauan/surat edaran yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga data surveilans tidak rutin diperoleh.
- j. Terdapat sisa anggaran layanan kekarantina kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara sebesar Rp. 17.150.000, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid dan dari pihak Pemda Kabupaten Merauke mengeluarkan himbauan/surat edaran yang membatasi aktivitas masyarakat dan menutup pintu masuk PLBDN sehingga tidak ada kegiatan layanan kekarantina di PLBDN.
- k. Terdapat sisa anggaran layanan kegawatdaruratan dan rujukan sebesar Rp. 8.600.000, hal ini disebabkan karena kurangnya pasien rujukan dari Pelabuhan/Bandara ke Rumah Sakit.
- l. Terdapat sisa anggaran kegiatan fogging, survey dan larvasida, dan beberapa kegiatan lainnya, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid dan dari pihak Pemda Kabupaten Merauke mengeluarkan himbauan/surat edaran yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga beberapa bulan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

C. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Neraca sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24 Neraca Sarana dan Prasarana
di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2020

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2020		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
I	POSISI BMN DI NERACA	19.878.715.810	1.474.211.586	21.352.927.396
A	ASET LANCAR	526.371.208	198.746.131	725.117.339
1	Persediaan	526.371.208	198.746.131	725.117.339
B	ASET TETAP	19.352.344.602	1.395.107.871	20.627.810.057
1	Tanah	6.129.239.000	-	6.129.239.000
2	Peralatan dan Mesin	15.528.630.194	2.336.582.786	17.865.212.980
3	Gedung dan Bangunan	9.776.504.000	875.947.000	10.652.451.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	-	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	<i>Akumulasi Penyusutan aset tetap</i>	<i>(12.082.028.592)</i>	<i>(1.937.064.331)</i>	<i>(14.019.092.923)</i>
C	ASET LAINNYA	0	-	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	-	0
2	Aset tidak berwujud	0	-	0
3	Aset Lain-lain	470.873.490	-	470.873.490
4	<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</i>	<i>(470.873.490)</i>	<i>-</i>	<i>(470.873.490)</i>
			-	
II	BMN NON NERACA	2.967.848	(424.448)	2.543.400
A	EKSTRAKOMPTABEL	2.967.848	(424.448)	2.543.400
1	BMN Ekstrakomptabel	11.731.132	222.200	11.953.332
2	<i>Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel</i>	<i>(8.763.284)</i>	<i>(646.648)</i>	<i>(9.409.932)</i>
B	BYPDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I+II)	19.881.683.658	1.473.787.138	21.355.470.796

3. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke per 31 Desember 2020 sebesar Rp 725.117.339,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari sebesar Rp 526.371.208,- (Lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), dan mutasi tambah persediaan selama periode Tahunan sebesar Rp 250.163.543,- (Dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), mutasi kurang selama Tahunan sebesar Rp. 51.417.412,- (Lima puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

4. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke per **31 Desember 2020 sebesar Rp 6.129.239.000,- (Enam milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari tanah seluas 6.261 m² dengan nilai sebesar Rp 6.129.239.000,- (Enam milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) dan mutasi kurang seluas 0 m².

5. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas III Merauke per **31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 17.876.944.112,-** (Tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua belas rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per **1 Januari 2020 sebesar Rp. 15.540.361.326,-** (Lima belas milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), **mutasi tambah sebesar Rp 2.336.582.786,-** (Dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), merupakan **Pembelian sebesar Rp. 400.000.000,-** (Empat ratus juta rupiah) dan **Transfer Masuk dari Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 1.936.582.786,-** (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

6. Gedung Dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas III Merauke per **31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.652.451.000,- (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp 9.776.504.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 1.047.877.000,- (Satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 171.930.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Mutasi tambah dan mutasi kurang merupakan hasil dari IP Revaluasi BMN.

Berdasarkan laporan posisi nilai barang milik negara di neraca, sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020 sebesar Rp. 21.355.470.796,- sedangkan tahun 2019 sebesar Rp. 19.878.715.810, terjadi kenaikan sebesar 1.476.754.986,- (6,9 %). Kenaikan nilai BMN disebabkan karena adanya penambahan belanja modal mobil ambulance pada tahun 2020, belanja persediaan dan penambahan nilai gedung dan bangunan hasil dari IP Revaluasi BMN oleh Kementerian Keuangan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari 7 (tujuh) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 diperoleh hasil semua indikator capaiannya melebihi 100 % dengan rincian :

- h. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 118,78 %
- i. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 110.83 %
- j. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara sebesar 113,68 %
- k. Nilai kinerja anggaran sebesar 110 %
- l. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 125 %
- m. Kinerja implementasi WBK Satker sebesar 118,29 %
- n. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 114,89 %

Keberhasilan pencapaian target disebabkan karena :

1. Disiplin dan komitmen dari pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
2. Kerjasama yang baik dengan Lintas Program dan Lintas Sektor
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Diharapkan dari kegagalan dan keberhasilan yang diperoleh dalam mencapai target di tahun 2020 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2021.

B. Tindak Lanjut

Menindaklanjuti hasil capaian kinerja tahun 2020 ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di tahun 2021 yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan Lintas Program lebih optimal
2. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
3. Membuat perencanaan lebih akurat dan tepat
4. Meningkatkan komitmen dan disiplin seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
5. Efisiensi/sisa anggaran dapat direvisi untuk kegiatan yang lain yang dapat menunjang/mendukung pencapaian target indikator
6. Membuat/ menjadwalkan peningkatan SDM semua pegawai

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Achmad Yurianto
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 12.182.878.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Juli 2020

Pihak Kedua,

dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001

Pihak Pertama,

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan	297.332
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%
		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6	Kinerja implementasi WDK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.778.786.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	9.404.092.000,-
	TOTAL	Rp.	12.182.878.000,-

Jakarta, 01 Juli 2020

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprpto, SKM. M.,Kes (Epid)
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Achmad Yurianto
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp 12.182.878.000,- berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2020

Pihak Kedua, 



dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001

Pihak Pertama,




Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)
NIP 197005181993031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2020
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	581.400
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
2	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	> 80 %
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 2.778.786.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 9.404.092.000,-
	TOTAL	Rp. 12.182.878.000,-

Jakarta, April 2020

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 



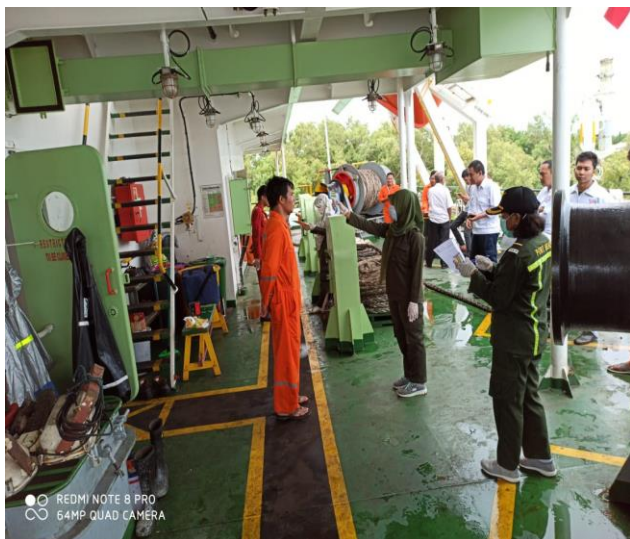
dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)
NIP 1970095181993031001

Dokumentasi kegiatan clearance in/out kapal tahun 2020





Pengawasan orang, barang dan alat angkut di Pelabuhan Gudang Arang



Kegiatan kegiatan Pengawasan orang, barang dan alat angkut di Bandar Udara Mopah





Kegiatan pengawasan pengawasan penumpang di Bandara Mopah Merauke



**Lapiran foto kegiatan kegiatan
Pengawasan orang, barang dan alat angkut
di Bandar Udara Mindiptana**



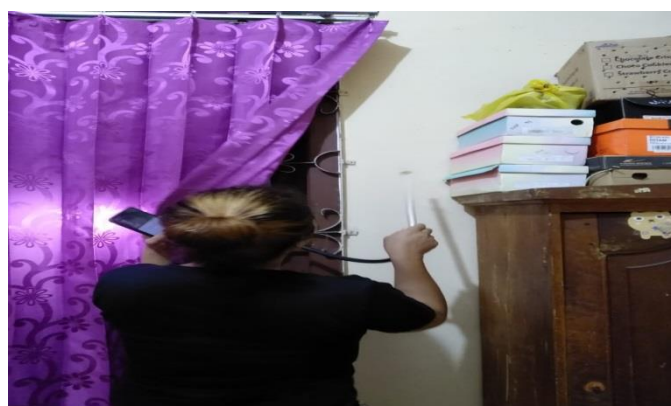
Dokumentasi vaksin meningitis



Dokumentasi kegiatan sosialisasi rencana kontijensi
Penanggulangan KKM di Pelabuhan Laut 17 Desember 2020



Dokumentasi survei nyamuk dewasa 2020



Dokumentasi survei jentik 2020





Dokumentasi pemasangan perangkat tikus 2020







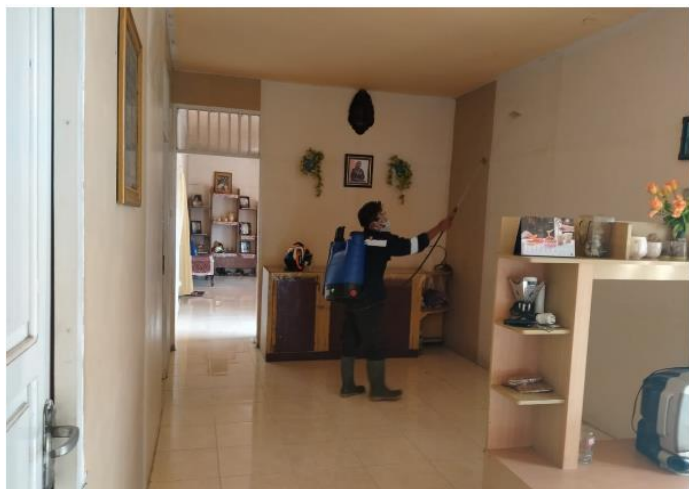
Dokumentasi survei vektor diare 2020



Kegiatan IRS di Pelabuhan Laut Merauke 2020



Kegiatan IRS di Pelabuhan Laut Merauke



Dokumentasi pengawasan barang penumpang



Foto kegiatan apel pagi Senin





Foto kegiatan rapat IKK





Foto kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah
Pejabat Administratif dan Pengawas



Foto Kegiatan Ujian Persamaan Ijasah

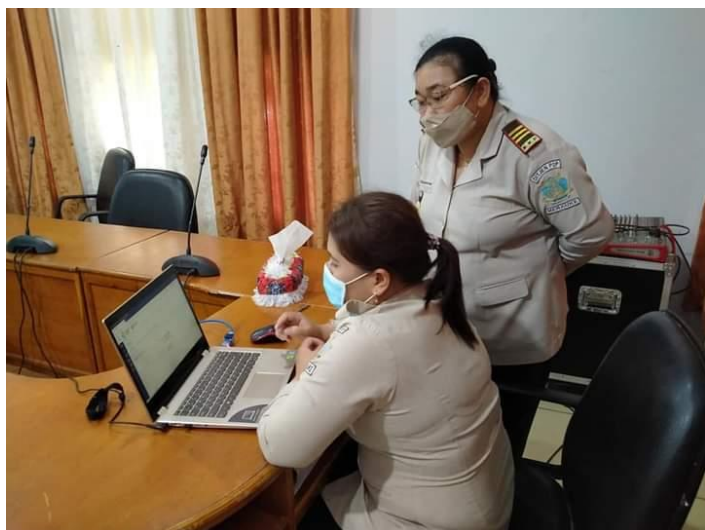


Foto Kegiatan Rakordit Paripurna Ditjen P2P



Foto kegiatan assesment WBK/WBBM oleh Itjen Kemenkes Inspektorat Investigasi



Foto kegiatan pemusnahan arsip yang disaksikan oleh Arsiparis Unit Kearsipan II Setditjen P2P



LAPORAN PERJALANAN DINAS TA 2020

NO	NAMA	JABATAN	TGL	KEGIATAN	BIAYA	KODE MAK
1	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	16 s/d 19 Januari 2020	BIMTEK Wilker Asmat	Satker	2063.970.052.A.524111
	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL an K LW	16 s/d 19 Januari 2020	BIMTEK Wilker Asmat	Satker	2063.970.052.A.524111
	Yeremias Wonam, SKM	Epidemolog Kesehatan Ahli	16 s/d 19 Januari 2020	BIMTEK Wilker Asmat	Satker	2063.970.052.A.524111
2	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	20 s/d 22 Januari 2020	KegiataN Pemantauan Wilker Kombut (Bandar Udara Tanah Merah)	Satker	2063.970.052.A.524111
	Yulianti Lande, S.Si., Apt	Kasie PKSE	20 s/d 22 Januari 2020	KegiataN Pemantauan Wilker Kombut (Bandar Udara Tanah Merah)	Satker	2063.970.052.A.524111
	Maryani Idris, S.Sos	Perencana	20 s/d 22 Januari 2020	KegiataN Pemantauan Wilker Kombut (Bandar Udara Tanah Merah)	Satker	2063.970.052.A.524111
	dr. Ika Juwita	Dokter	20 s/d 22 Januari 2020	KegiataN Pemantauan Wilker Kombut (Bandar Udara Tanah Merah)	Satker	2063.970.052.A.524111

	Rika Pratiwi	Perawat	20 s/d 22 Januari 2020	Kegiatan Pemantauan Wilker Kombut (Bandar Udara Tanah Merah)	Satker	2063.970.052.A.524111
3	Andarias Paskawanto Kolawi, SKM., MPH	Epidemiolog Kesehatan Ahli	20 s/d 26 Januari 2020	Pertemuan Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahunan UAPPA/B E-1 Ditjen P2P TA 2019	Satker	2063.970.052.B.52411
	Lilik Nur Kholidah, AMK	Perawat	20 s/d 26 Januari 2020	Pertemuan Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahunan UAPPA/B E-1 Ditjen P2P TA 2019	Pusat	-
	Eni Sartika Simanjuntak, S. Sos	Arsiparis	20 s/d 26 Januari 2020	Pertemuan Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahunan UAPPA/B E-1 Ditjen P2P TA 2019	Pusat	-
4	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	27 s/d 28 Januari 2020	Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Paripurna di Jakarta	Satker	2063.970.052.A.524111
5	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	29 s/d 01 Februari 2020	Pertemuan Pengelolaan Persuratan kearsipan, keprotokolan dan PDLN Ditjen P2P di Bali	Satker	2063.970.055.B.52411
	Eni Sartika Simanjuntak, S. Sos	Arsiparis	29 s/d 01 Februari 2020	Pertemuan Pengelolaan Persuratan kearsipan, keprotokolan dan PDLN Ditjen P2P di Bali	Pusat	-
6	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	03 s/d 04 Februari 2020	Konsultasi Program P2P di Ditjen P2P, di Jakarta	Satker	2063.970.052.A.524111

7	Gumson Josua Tampubolon, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	09 s/d 16 Februari 2020	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pusat	-
8	Maryani Idris, S.Sos	Perencana	10 s/d 15 Februari 2020	Pembahasan dan Penelaahan Usul kegiatan dan Anggaran Program P2P TA 2021	Pusat	-
9	Bertha Tangke, BSc	Sanitarian	10 s/d 15 Februari 2020	Pembahasan dan Penelaahan Usul kegiatan dan Anggaran Program P2P TA 2021	Pusat	-
11	Pius Tandi Rantetasak, A.Md., Kep	Perawat	13 Februari 2020	Implementasi Hasil Konsultasi dengan Kepala seksi PRL dan KLW Mengenai Pelaksanaan Proker Wilker Wanam	Satker	2063.970.052.A.524111
13	dr Ika Juwita	Dokter	16 s/d 29 Februari 2020	Pelatihan Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Lanjut	Pusat	-
14	Yulianti Lande, S.Si., Apt	Plt. Ka Subbag Tata Usaha	16 s/d 29 Februari 2020	Pelatihan Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Mahir	Pusat	-
15	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	18 s/d 21 Februari 2020	Pertemuan Rakerkesnas	Pusat	-
16	Rika Pratiwi, AMK	Perawat	19 s/d 21 Februari 2020	Penyusunan ,updating data dan desk RUP Tahun 2020	Pusat	-

17	Rika Pratiwi, AMK	Perawat	24 s//d 25 Februari 2020	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Makassar	Satker	2063.970.055.D.524111
18	Delifour Bekia BR. Hutagaol, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	24 s/d 28 Februari 2020	RAKONTEK Program P2P Tahun 2020	Pusat	-
19	Maryani Idris, S.Sos	Perencana	26 s/d 28 Februari 2020	Koordinasi Penghapusan BMN di DJKN Provinsi Papua	Satker	2063.970.055.G.524111
20	Frederikus Lefitar,	Perencana	26 s/d 28 Februari 2020	Koordinasi Penghapusan BMN di DJKN Provinsi Papua	Satker	2063.970.055.G.524111
21	Rika Pratiwi, AMK	Perawat	26 s/d 28 Februari 2020	Workshop Monev dan Konsolidasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	Satker	2063.970.055.D.524111
22	Delifour Bekia BR. Hutagaol, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	28 s/d 29 Februari 2020	Penutupan Diklat Karantina Tingkat Dasar, Lanjut, Mahir dan Wilayah Tahun 2020	Satker	2063.970.052.A.524111
23	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	02 S/D 05 Maret 2020	Pertemaun Koordinasi Teknis Propinsi Persiapan PON 2020 di Jayapura	Satker	4249.001.002.057.B.524111
24	Gumson Josua Tampubolon, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	03 S/D 07 Maret 2020	Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi persiapan PON 2020 di Jayapura	Satker	4249.001.002.057.B.524111

25	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan K LW	03 S/D 07 Maret 2020	Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi persiapan PON 2020 di Jayapura	Satker	4249.001.002.057.B.524111
26	Rosjunaida Malau, SE	Bendahara Penerimaan	03 S/D 07 Maret 2020	Pertemuan penilaian Mandiri penatalaksanaan Kantor BERHIAS Di Yogyakarta	Pusat	-
27	dr. Andi Farida	Dokter	04 s/d 07 Maret 2020	Pertemuan Kemitraan Swasta dalam rangka peningkatan kapasitas dalam tatalaksana malaria dan memperkuat jejaring terhadap pengendalian malaria menuju Eliminasi Malaria Indonesia di Jayapura	Pusat	-
28	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	09 s/d 10 Maret 2020	Workshop Manging Service Consistency di Jakarta	Satker	2063.970.052.A.524111
	Yulianti Lande, S.Si., Apt	Kasie PKSE	09 s/d 11 Maret 2020	Workshop Peningkatan Kapasitas dalam rangka pelacakan kontak COVID-19 di Bekasi	Pusat	-
29	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	11 Maret 2020	Kegiatan Penguatan Sistem tata kelola perbatasan Negara khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas Negara di Jakarta	Pusat	-

30	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	12 s/d 14 Maret 2020	Evaluasi SAKIP desk Satker Pusat dan Daerah di Depok	Satker	2063.970.052.H.524111
31	Delifour Bekia BR. Hutagaol, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	10 s/d 14 Maret 2020	Evaluasi SAKIP desk Satker Pusat dan Daerah di Depok	Pusat	-
32	Oktavia Marindatu, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	10 s/d 14 Maret 2020	Evaluasi SAKIP desk Satker Pusat dan Daerah di Depok	Pusat	-
33	Gumson Josua Tampubolon, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	16 s/d 19 Maret 2020	Pertemuan Sosialisasi PMK Revisi Aplikasi SAKTI TA2020 dan Kenaikan target PNBPN 2021 di Bekasi	Pusat	-
34	Johlwis Tamalonggehe, A.Md., KL	Korwil Mindip Tanah/ Sanitarian	18 Maret 2020	Rapat Koordinasi sehubungan dengan meningkatnya penyakit KLB/Wabh kasus COVID 19 di Aula Kodim BVD Tanah Merah	Satker	2063.970.052.A.524111
36	Suprpto, SKM., M.Kes (Epid)	Kepala Kantor	18 s/d 20 Maret 2020	Rapat Koordinasi sehubungan dengan meningkatnya penyakit KLB/Wabh kasus COVID 19 di Aula Kodim BVD Tanah Merah	Satker	2063.970.052.A.524111
37	Ns.Muhin Steven Imbiri	Koorwil Bade/ Perawat	22 Maret 2020	Melaksanakan clerance IN/Out CPO MT SAEHAN FREESIA	KORINDO	-

38	Andarias Paskawanto Kolawi, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	05 s/d 07 Juni 2020	Patroli perbatasan darat guna mengantisipasi penyebaran Virus COVID 19 yang melewati jalur pelintas di kawasan perbatasan RI-PNG Kabupaten Merauke.	Satker	2063.970.052.A.524111.
39	Aan Hendra Sukma, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	05 s/d 07 Juni 2020	Patroli perbatasan darat guna mengantisipasi penyebaran Virus COVID 19 yang melewati jalur pelintas di kawasan perbatasan RI-PNG Kabupaten Merauke.	Satker	2063.970.052.A.524111.
42	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	05 s/d 07 Juli 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111
43	Sutrisno,S.Sos	Kasie PRL dan KLW	05 s/d 07 Juli 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111
44	Yeremias Wonam,SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	05 s/d 07 Juli 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111
45	Aan Hendra Sukma, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	05 s/d 07 Juli 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111
49	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	16 Juli 2020	Melaksanakan Kegiatan Monitoring di wilayah kerja PLBD Sota.	Satker	2063.970.001.052.A.524113

50	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor		a. Konsultasi Kepegawaian		
51	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan KLW	04 s/d 07 Agustus 2020	b. Kosultasi/ Koordinasi Pengadaan Ambulance PLBD di ULP P2P Kementerian Kesehatan RI	Satker	2063.970.001.052.A.524113
52	Aan Hendra Sukma, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli		c. Peningkatan Pengetahuan SDM tentang Karantina di Pintu Masuk Negara, di Jakarta.		
59	Aan Hendra Sukma, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli		10-Sep-20		
60	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	13 S/D 15 September 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111.
61	Sutrisno,S.Sos	Kasie PRL dan KLW	13 S/D 15 September 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111.
62	Bertha Tangke, BSc	Sanitarian	13 S/D 15 September 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111.
64	Yulianti Lande, S.Si., Apt	Ka Subbag Tata Usaha	13 S/D 15 September 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111.

65	Rosjunaida Malau, SE	Bendahara Penerimaan	13 S/D 15 September 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111.
68	Yeremias Wonam, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	13 S/D 15 September 2020	Bimbingan Teknis ke wilayah kerja PLBD Mindiptana	Satker	2063.970.001.052.A.524111.
70	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	20 s/d 23 September 2020	a. Koordinasi penanganan COVID-19 di Provinsi Jayapura b. Koordinasi dengan Sesditjen P2P untuk kegiatan penanganan COVID-19 di Jakarta (Aksi bagi Masker) c. Konsultasi dalam rangka revisi Anggaran di Jakarta	Satker	2063.970.001.051.D.524111.
71	Yeremias Wonam, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	20 s/d 23 September 2020	Konsultasi terkait penguatan tugas pokok dan fungsi PPNS, di Jakarta.	Satker	2063.970.001.055.A.524111
74	Johlwis Tamalonggehe, A.Md., KL	Sanitarian	20 s/d 23 September 2020	b. Konsultasi Kepegawaian, di Jakarta.	Satker	
75	Arwina Paramma, SKM	Entomolog	20 s/d 23 September 2020	Melaksanakan konsultasi kapasitas SDM Entomolog, di Jakarta		4249.001.001.053.A.524111

77	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan K LW	20 s/d 23 September 2020	Konsultasi dalam rangka penyusunan E-Monev Penganggaran dan Follow Up pengadaan kendaraan dinas, di Jakarta	Satker	2063.970.001.052.B.524111
79	Yulianti Lande, S.Si., Apt	Ka Subbag Tata Usaha	24 S/D 26 September	Melaksanakan Pemantauan ke Wilker (Penjemputan PMI dari Negara PNG ke RI, Merauke)		2063.970.001.052.A.524111.
80	dr. Andi Farida	Dokter	24 S/D 26 September	Melaksanakan Pemantauan ke Wilker (Penjemputan PMI dari Negara PNG ke RI, Merauke)	Satker	2063.970.001.052.A.524111.
81	Gumson J. Tampubolon, SKM, MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	24 S/D 26 September	Melaksanakan Pemantauan ke Wilker (Penjemputan PMI dari Negara PNG ke RI, Merauke)		2063.970.001.052.A.524111.
84	Delifour BR Hutagaol, SKM	Kasie PKSE	26 S/D 29 September 2020	Melaksanakan SKP Pegawai dan koordinasi pelaksanaan pengawasan COVID di Wilayah Kerja Asmat		2063.970.001.054.C.524111
85	Andarias P. Kolawi, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	26 S/D 29 September 2020	Melaksanakan SKP Pegawai dan koordinasi pelaksanaan pengawasan COVID di Wilayah Kerja Asmat		2063.970.001.054.C.524111
86	Rika Pratiwi, AMK	Perawat	26 S/D 29 September 2020	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi program Seksi di wilayah Kerja Asmat.	Satker	2063.970.001.054.A.524111

87	Tri Nindi Gaib, A.Md.,KL	Sanitarian	26 S/D 29 September 2020	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi program Seksi di wilayah Kerja Asmat.		2063.970.001.054.A.524111
88	Pius Tandi Rantetasak, A.Md., Kep	Perawat	05 Oktober 2020	kegiatan Pertemuan Koordinasi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan di Merauke		4249.001.004.055.A.524111
89	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan KLW	12 Oktober 2020	Melaksanakan Clerance In/Out CPO MT HAI YAN	KORINDO	-
90	Ns. Muhin Steven Imbiri, S.Kep	Perawat	12 Oktober 2020	Melaksanakan Clerance In/Out CPO MT HAI YAN	KORINDO	-
92	Martina P. Toker, A.Md	Pranata Lab. Kesehatan	13 s/d 16 Oktober 2020	Konsultasi Kearsipan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas kearsipan, di Jakarta.		2063.970.001.055.B.524111
93	Rika Pratiwi, AMK	Perawat	13 s/d 16 Oktober 2020	Konsultasi Kearsipan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas kearsipan, di Jakarta.	Satker	2063.970.001.055.B.524111
94	Pius Tandi Rantetasak, A.Md., Kep	Perawat	13 s/d 16 Oktober 2020	Melaksanakan Konsultasi dalam rangka penyusunan LAKIP, di Jakarta.		2063.970.001.055.H.524111

96	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	14 s/d 17 Oktober 2020	Evaluasi Pelaksanaan Kekejarantinaan di Pintu Masuk Negara dalam rangka Pengendalian KKMMMD COVID-19 di Bandara Juanda dan Wisma Karantina, di Aula KKP Kelas I Surabaya.	Satker	2063.970.001.052.A.524111.
97	Andarias Paskawanto Kolawi, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	18 s/d 24 Oktober 2020	Mengikuti TOT Entomologi Malaria Bagi Petugas Puskesmas pada	Pusat	-
98	Johlwis Tamalonggehe, A.Md., KL	Sanitarian	18 s/d 24 Oktober 2020	Mengikuti TOT Entomologi Malaria Bagi Petugas Puskesmas pada	Pusat	-
99	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	19 s/d 21 Oktober 2020	Melaksanakan BIMTEK Pengelolaan PNBP di Wilayah Kerja Bade.	Satker	2063.970.001.053.C.524111
100	Yulianti Lande, S.Si., Apt	Ka Subbag Tata Usaha	19 s/d 21 Oktober 2020	Melaksanakan BIMTEK Kepegawaian di Wilayah Kerja Bade	Satker	2063.970.001.054.C.524111
101	Gumson J. Tampubolon, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	19 s/d 21 Oktober 2020	Melaksanakan BIMTEK Kepegawaian di Wilayah Kerja Bade	Satker	2063.970.001.054.C.524111
103	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan KLW	19 s/d 21 Oktober 2020	Melaksanakan BIMTEK Pengelolaan PNBP di Wilayah Kerja Bade.	Satker	2063.970.001.053.C.524111

105	Lilik Nur Kholidah, AMK	Perawat	26 s/d 28 Oktober 2020	Konsultasi dalam rangka RKBMN/ Penghapusan BMN	Satker	2063.970.001.055.G.524111
106	Yeremias Wonam, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli	11 November s/d 16 November 2020	Menghadiri Undangan Pertemuan Penguatan penyelesaian masalah Kekeparantinaan Kesehatan dari perspektif PPNS di Hotel NDC Manado, Sulawesi Utara	Satker	4249.001.004.053.A.524111
107	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan KLW	11 November s/d 16 November 2020	Menghadiri Undangan Pertemuan Penguatan penyelesaian masalah Kekeparantinaan Kesehatan dari perspektif PPNS di Hotel NDC Manado, Sulawesi Utara	Satker	2063.970.001.052.A.524111
108	dr Maryam Wangguway	Dokter	11 November s/d 16 November 2020	Menghadiri Undangan Pertemuan Penguatan penyelesaian masalah Kekeparantinaan Kesehatan dari perspektif PPNS di Hotel NDC Manado, Sulawesi Utara	Satker	2063.970.001.052.A.524111
109	Delifour BR Hutagaol, SKM	Kasie PKSE	11 November s/d 16 November 2020	Menghadiri Undangan Pertemuan Penguatan penyelesaian masalah Kekeparantinaan	Satker	2063.970.001.052.A.524111

				Kesehatan dari perspektif PPNS di Hotel NDC Manado, Sulawesi Utara		
110	Oktavia Marindatu, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	11 November s/d 16 November 2020	Menghadiri Undangan Pertemuan Penguatan penyelesaian masalah Kekarantinaan Kesehatan dari perspektif PPNS di Hotel NDC Manado, Sulawesi Utara	Satker	2063.970.001.052.A.524111
111	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	14 November s/d 15 November 2020	Mengikuti Kegiatan Border Camp dengan tema “ telusur jejak sang Pahlawan, di Zona PLBN Sota	Satker	4249.001.004.051.A.524113
112	Gumson J. Tampubolon,SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	20 November s/d 22 November 2020	Mengikuti Reviu Pengendalian Intern atas peloparan keuangan (PIPK) di Maqna Hotel, Gorontalo	Satker	
113	Gumson J. Tampubolon,SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	23 November s/d 26 November 2020	Konsultasi Pelaksanaan Pengadaan Ambulance di Inspektorat Jenderal, di Jakarta.	Satker	2063.970.001.055.D.524111
114	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	20 November s/d 22 November 2020	Mengikuti Reviu Pengendalian Intern atas peloparan keuangan (PIPK) di	Satker	

				Maqna Hotel, Gorontalo		
115	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	23 November s/d 25 November 2020	Pertemuan koordinasi pelaksanaan program P2P, di Jakarta	Satker	2063.970.001.052.A.524111
116	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	27 November s/d 30 November 2020	Mengikuti Undangan Peningkatan kapasitas Pemeriksaan Tes Cepat dan Rujukan Laboratorium bagi petugas KKP di Pintu Masuk, di Hetel Four Points Balikpapan	-	
117	Yulianti Lande,S.Si., Apt	Ka Subbag Tata Usaha	10 November s/d 14 November 2020	Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan dan Perhitungan ABK di Lingkungan KKP Kelas III Biak dari Biro Hukum dan Organisasi Kemkes RI dan Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen P2P, di Ruang Rapat KKP Kelas III Biak.	Satker	2063.970.001.054.B.524111

118	Gumson J. Tampubolon, SKM., MPH	Epidemiolog Kesehatan Ahli	11 November s/d 14 November 2020	Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan dan Perhitungan ABK di Lingkungan KKP Kelas III Biak dari Biro Hukum dan Organisasi Kemkes RI dan Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen P2P, di Ruang Rapat KKP Kelas III Biak.	Satker	2063.970.001.054.B.524111
119	Lilik Nur Kholidah, AMK	Perawat	12 November s/d 14 November 2020	Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan dan Perhitungan ABK di Lingkungan KKP Kelas III Biak dari Biro Hukum dan Organisasi Kemkes RI dan Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen P2P, di Ruang Rapat KKP Kelas III Biak.	Satker	2063.970.001.054.B.524111
120	Rika Pratiwi, AMK	Perawat	13 November s/d 14 November 2020	Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan dan Perhitungan ABK di Lingkungan KKP Kelas	Satker	2063.970.001.054.B.524111

				III Biak dari Biro Hukum dan Organisasi Kemkes RI dan Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen P2P, di Ruang Rapat KKP Kelas III Biak.		
121	Tri Nindi Gaib, A.Md., KL	Saniatarian	14 November s/d 14 November 2020	Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Peta Jabatan dan Perhitungan ABK di Lingkungan KKP Kelas III Biak dari Biro Hukum dan Organisasi Kemkes RI dan Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen P2P, di Ruang Rapat KKP Kelas III Biak.	Satker	2063.970.001.054.B.524111
122	Yulianti Lande, S.Si., Apt	Ka Subbag Tata Usaha	18 November s/d 23 November 2020	Mengikuti Reviu Pengendalian Intern atas peloparan keuangan (PIPK) di Maqna Hotel, Gorontalo	Satker	
123	Andarias P. Kolawi, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	18 November s/d 23 November 2020	Mengikuti Reviu Pengendalian Intern atas peloparan keuangan (PIPK) di Maqna Hotel, Gorontalo	Satker	

124	Eni Sartika Simanjuntak, S.Sos	Arsiparis	18 November s/d 23 November 2020	Mengikuti Reviu Pengendalian Intern atas peloparan keuangan (PIPK) di Maqna Hotel, Gorontalo	Satker	
126	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan KLW	23 November s/d 26 November 2020	Mengikuti Pertemuan Penguatan dan Evaluasi Penanggulangan COVID 19 di Pintu Masuk, di KKP Kelas I Makassar	Satker	
127	Elprida Silalahi, SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	24 November s/d 26 November 2020	Mengikuti Pertemuan Penguatan dan Evaluasi Penanggulangan COVID 19 di Pintu Masuk, di KKP Kelas I Makassar	Satker	
130	Andarias P. Kolawi, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	26 November s/d 29 November 2020	Mengikuti Training <i>Mobile Data Collection</i> di Lab Komputer FKM UNHAS , Makassar	Satker	4249.001.004.053.a.524111
131	Gumson Josua Tampubolon, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	26 November s/d 29 November 2020	Mengikuti Training <i>Mobile Data Collection</i> di Lab Komputer FKM UNHAS , Makassar	Satker	4249.001.004.053.a.524111
132	dr. Maryam Wangguway	Dokter	26 November s/d 29 November 2020	Mengikuti Training <i>Mobile Data Collection</i> di Lab Komputer FKM UNHAS , Makassar	Satker	4249.001.004.053.a.524111

133	Martina P. Toker, A.Md	Pranata Lab. Kesehatan	27 November s/d 30 November	Mengikuti Undangan Peningkatan kapasitas Pemeriksaan Tes Cepat dan Rujukan Laboratorium bagi petugas KKP di Pintu Masuk, di Hetel Four Points Balikpapan	Satker	
135	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	01 Desember s/d 05 Desember 2020	Mengikuti Pertemuan Evaluasi Nasional Semester 6 Program Pengendalian HIV AIDS Dukungan GF NFMc 2018-2020, di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo NTT	Satker	
136	Tri Nindi Gaib, A.Md.,KL	Saniatarian	01 Desember s/d 05 Desember 2020	Mengikuti Pertemuan Evaluasi Nasional Semester 6 Program Pengendalian HIV AIDS Dukungan GF NFMc 2018-2020, di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo NTT	Satker	
139	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	15 Desember s/d 18 Desember 2020	Konsultasi pelaksanaan program P2P, di Jakarta	Satker	2063.970.001.052.A.524111
140	Gumson J. Tampubolon, SKM., MPH	Epideomolog Kesehatan Ahli	15 Desember s/d 18 Desember 2020	Konsultasi Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan, Pemberian Blacklist	Satker	2063.970.001.055.G.524111

				akibat pemutusan Kontrak Pengadaan Ambulnace PLBD KKP Merauke, di Jakarta		
141	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	29 Desember s/d 31 Desember 2020	Melaksanakan Koordinasi dengan PT KORINDO terkait dengan penempatan petugas KKP Merauke, dan Melakukan peninjauan rumah sewa Wilayah Kerja Mindiptanah	Satker	2063.970.001.055.G.524111
142	Delifour BR Hutagaol, SKM	Kasie PKSE	01 Desember s/d 03 Desember 2020	Melaksanakan Bimbingan Teknis Kegiatan Ke Wilayah Kerja Wanam	Satker	2063.970.001.052.A.524111
143	Penataria Sianipar, SE	Bendahara	01 Desember s/d 03 Desember 2020	Melaksanakan Bimbingan Teknis Kegiatan Ke Wilayah Kerja Wanam	Satker	2063.970.001.052.A.524111
144	Yeremias Wonam,SKM	Epideomolog Kesehatan Ahli	01 Desember s/d 03 Desember 2020	Melaksanakan Bimbingan Teknis Kegiatan Ke Wilayah Kerja Wanam	Satker	2063.970.001.052.A.524111
147	Delifour BR Hutagaol, SKM	Kasie PKSE	07 Desember s/d 09 Desember 2020	Mengikuti Kunjungan Kerja Tim Kementerian Kesehatan Ke Provinsi Papua, DI Jayapura	Satker	2063.970.001.052.A.524111
148	dr Andi Farida	Dokter	07 Desember s/d 09 Desember 2020	Mengikuti Kunjungan Kerja Tim Kementerian	Satker	2063.970.001.052.A.524111

				Kesehatan Ke Provinsi Papua, DI Jayapura		
149	Feri Henos Rerey, SKM	Saniatarian	29 Desember s/d 31 Desember 2020	Melaksanakan Koordinasi dengan PT KORINDO terkait dengan penempatan petugas KKP Merauke, b. Melakukan peninjauan rumah sewa Wilayah Kerja Mindiptanah	Satker	2063.970.001.055.G.524111
154	Sutrisno, S.Sos	Kasie PRL dan KLW	29 Desember s/d 31 Desember 2020	Melaksanakan Konsultasi tentang pengadaan Rapid Tes Antigen, di Jakarta	Satker	2063.970.001.054.B.524111
155	Yeremias Wonam, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli	29 Desember s/d 31 Desember 2020	Melaksanakan Konsultasi tentang pengadaan Rapid Tes Antigen, di Jakarta	Satker	2063.970.001.054.B.524111



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE



Jl. Prajurit Merauke 99616
Telp: (0971) 3330263, e-mail: kkpmerk@gmail.com, Website: kkpmerauke.com

SURAT TUGAS
NOMOR: KP.01.01/1/1066/2020

Sehubungan dengan surat nomor KP.01.01/1/2052/2020 Tanggal 16 Juli 2020, dengan ini kami menugaskan kepada :

N a m a : **dr.Bambang Budiman**
N I P : 196905312006041001
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor

- Untuk :
1. Mengikuti *Zoom Meeting* Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang penataan Jabatan dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan pukul 15.00 WIT s/d Selesai.
 2. Melaksanakan tugas tersebut dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
 3. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas.
 4. Surat Tugas ini berlaku tanggal 23, 24 dan 27 Juli 2020.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

23 Juli 2020
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke,

dr. Bambang Budiman
NIP. 196905312006041001

Lampiran

Nomor : KP.01.01/1/2663/2020

Tanggal : 23 Juli 2020

DAFTAR PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1	Yulianti Lande, S.Si., Apt	197407161994032002	IV/a	Ka Subbag Tata Usaha
2	Sutrisno, S.Sos	196309081986031002	III/d	Kasie PRL dan KLW
3	Delifour BR Hutagaol, SKM	197502262002122010	III/c	Kasie PKSE
4	Rosjunaida Malau, SE	197506072014072001	III/b	Bendahara
5	Eni Sartika Simanjuntak, S.Sos	198007142014072007	II/b	Arsiparis

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke,



**LAPORAN SOSIALISASI PERMENKES NO. 40 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KAMIS, 23 JULI 2020**

1. Peserta :
 - a. dr. Bambang Budiman (Kepala Kantor)
 - b. Yulianti Lande SSi., Apt. (Kasubbag TU)
 - c. Sutrisno, S.Sos. (Kasie PRL dan KLW)
 - d. Delifour BR Hutagaol, SKM (Kasie PKSE)
 - e. Rosjunaida Malau, SE (Staf TU)
 - f. Eni Sartika Simanjuntak (Staf TU)
 - g. Penataria Sianipar (Staf TU)
2. Hari/ Tanggal : Kamis, 23 Juli 2020
3. Waktu : 15.00 – 17.00 WIT
4. Penyelenggara : Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI
5. Metode Pelaksanaan : Vicon
6. Hal-hal yang dibahas :
 - a. Gambaran PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan
 - b. Grand design pengelolaan ASN 2020 – 2024
 - c. Akan dilaksanakan penataan ASN sehingga dapat mewujudkan postur ASN yang ideal sesuai kebutuhan organisasi.
 - d. Bagi pegawai yang kompeten, berkualifikasi dan berkinerja akan dipertahankan, kemudian bagi ASN yang tidak berkompeten dan kualifikasinya

tidak sesuai namun berkinerja akan didiklatkan, sedangkan ASN yang berkompeten, kualifikasi sesuai namun tidak berkinerja akan dikenakan rotasi/mutasi

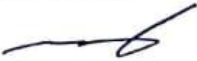
- e. Bagi ASN yang tidak kompeten, kualifikasinya tidak sesuai, berkinerja buruk akan dirasionalisasi dengan cara pension dini atau dengan skema *goldenshakehard*
- f. Dengan melakukan digitalisasi dan penyederhanaan proses, porsi jabatan pelaksana (administrasi) akan berkurang, sehingga pemerintah dapat berfokus pada peningkatan jumlah tenaga teknis untuk meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah
- g. Dengan melakukan penataan JP dan JF maka akan diperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi JP & JF yg tepat sesuai dg persyaratan jabatan & kebutuhan organisasi utk peningkatan kinerja berdasarkan visi & misi organisasi.
- h. Dengan penetapan jabatan terhadap PNS maka akan memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas PNS & Satker, besaran Tukin dapat ditentukan,

Pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi


- i. Alur pindah pegawai, dan alur alih jabatan, penyesuaian atau *inpassing*,
- j. Pengembangan kompetensi perlu dilaksanakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian syarat jabatan dan dilakukan utk memenuhi syarat jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- k. Pemberhentian pegawai dapat dilakukan bagi PNS yg tidak memenuhi syarat jabatan dan tidak dapat dilakukan perpindahan unit kerja, perpindahan jabatan, penyesuaian/*inpassing*, atau pengembangan kompetensi serta dilakukan melalui mekanisme pemberhentian karena kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan singkat pelaksanaan kegiatan

Mengetahui
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke

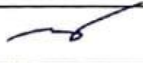


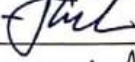

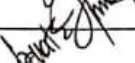


dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

Merauke, 23 Juli 2020
Notulis


Eni Sartika Simanjuntak
NIP 198007142014072007

1

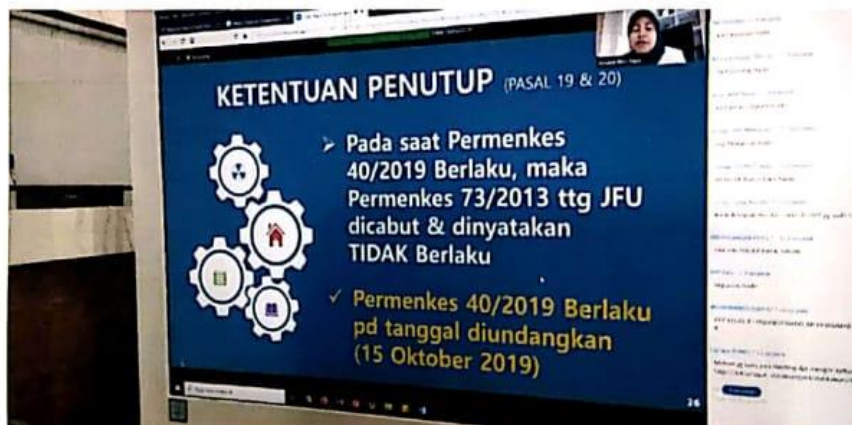
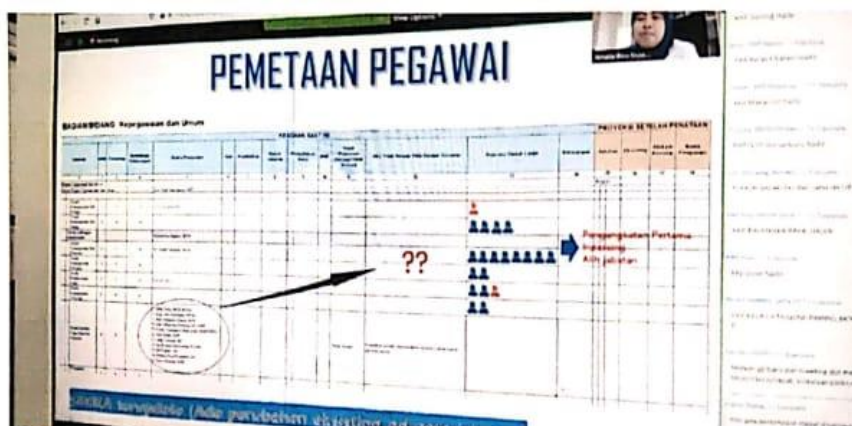
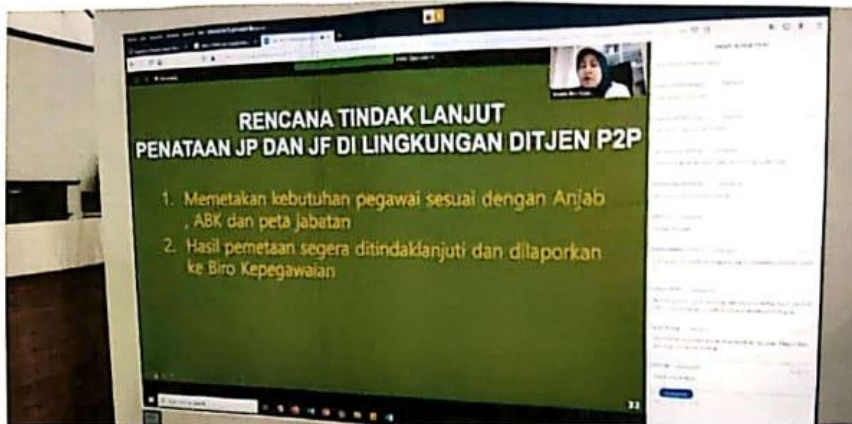
**DAFTAR HADIR SOSIALISASI PERMENKES 40 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KAMIS 23 JULI 2020**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	
2	Yuhanti Jande	Kasubag TU	
3	Delipour Bekia Hutugoor.	Ka. Sir. PESE	
4	SUTRISNEO	Kan-PRL KLUW	
5	Rosjunaida Malau	Staf TU	
6	Eni Sartiba. S	Staf TU	
7	Penataria Siampar	Staf TU	
8			
9			

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke

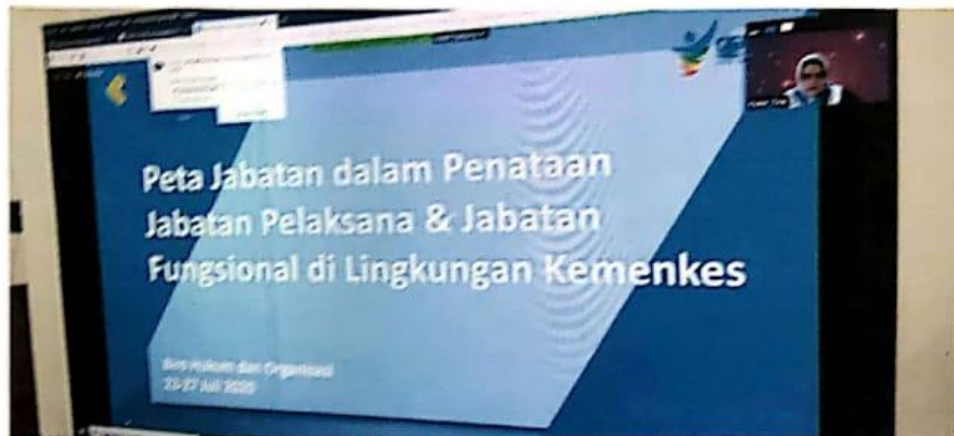


dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001



LAMPIRAN

SOSIALISASI PERMENKES NO. 40 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KAMIS, 23 JULI 2020



KINERJA IMPLEMENTASI WBK SATKER

NAMA UNIT KERJA : KKP MERAUKE
TAHUN EVALUASI : 2020

:
:

PENILAIAN		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Program evaluasi	Keterangan	Dokumen yang sudah ada (Mohon diisi)	Dokumen Yang Belum Dipenuhi (Mohon diisi)
MANAJEMEN PERUBAHAN (8)		8,0		8,00	100,00 %				
1 Tim Kerja (1)		1,0		1,00	100,00 %				
a.	Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?	Y/T	Ya	1		dapatkan dan teliti SK Tim ZI	Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.		
b.	Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas?	A/B/C	A	1		dapatkan dan teliti mekanisme penentuan anggota, yakinkan proses itu berjalan.	a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja; c. Jika tidak diseleksi.		
2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)		2,0		2,00	100,00 %				
a.	Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	Y/T	Ya	1		dapatkan dan teliti dokumen pembangunan ZI, mulai perencanaan pembangunannya sampai pengembangannya, catat sekarang sudah pada posisi tahun ke berapa.	Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.		
b.	Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	A/B/C	A	1		teliti dokumen perencanaan pastikan tujuan untuk membentuk unit yang "bebas korupsi dan melayani", dan cek keselarasan program kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai	a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.		
c.	Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?	A/B/C	A	1		dapatkan media sosialisasi, laporan sosialisasi, cek dan catat cakupan audience sosialisasi/media informasinya.	a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala; b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala; c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.		
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)		2,0		2,00	100,00 %				
a.	Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?	A/B/C/D	A	1		dapatkan laporan pelaksanaan pembangunan ZI (klo ada, kalo tidak ada catat semua kegiatan dalam pembangunan ZI), bandingkan dengan dokumen rencana pembangunan	a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana.		
b.	Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas?	A/B/C/D	A	1		dapatkan laporan monev pembangunan ZI, teliti cakupan evaluasinya, catat keberkalaannya.	a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala; d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas.		

	c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?		A/B/C/D	A	1		dapatkan laporan hasil tindak lanjut (klo ada), kalo tidak ada, bandingkan antara rekomendasi dengan kegiatan yang berhubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi.	a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti.		
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3)	3,0			3,00	100,00 %				
	a. Apakah pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?		Y/T	Ya	1		wawancara dengan pegawai, pastikan bahwa pimpinan memberikan contoh, test bebrapa pertanyaan yang berhubungan dengan contoh perilaku (mis: datang tepat waktu, dll)	ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.		
	b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?		A/B/C	A	1		dapatkan SK pembentukan agen perubahan	a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; c. Jika belum terdapat agen perubahan.		
	c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?		A/B/C	A	1		dapatkan agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir, (sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja)	a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan; b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan; c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir.		
	d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		A/B/C/D	A	1		dapatkan notulen rapat pembangunan ZI, cek elemen organisasi apakah ada unsur keterwakilan dari setiap seksi,	a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto banner, poster dll); c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto banner, poster dll); d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.		
PENATAAN TATALAKSANA (7)		7,0			3,95	56,38%				
1	prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2)	2,0			1,45	72,33%				
	a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?		A/B/C/D	B	0,67		dapatkan peta proses bisnis utama dan daftar SOP, (pengawasan dan pelayanan BC), cek keselarasan dengan SOP	a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.		

	b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?		A/B/C/D/E	B	0,75		observasi pelaksanaan SOP	<p>a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;</p> <p>b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi;</p> <p>d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi;</p> <p>e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi.</p>		
--	--	--	-----------	---	------	--	---------------------------	--	--	--

	c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi?		A/B/C/D/E	B	0,75		dapatkan laporan evaluasi pelaksanaan SOP	a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi; e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.		
2	E-Office (4)	4,0			2,00	50,00%				
	a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0,5		lakukan wawancara, pastikan sistem informasi pengukuran kinerja berjalan, 2) lakukan sample untuk 1 sasaran/1 SKP.	a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi; c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi.		
	b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0,5		wawancara, test case untuk 1 nama pegawai.	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM.		
	c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0,5		wawancara, dan test case untuk 1 jenis layanan, pastikan kejelasan prosedur, waktu dan biaya, serta pengaduan layanan menggunakan e-gov.	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.		
	d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?		A/B/C	B	0,5			a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala; c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.		
3	Keterbukaan Informasi Publik (1)	1,0			0,50	50,00%				
	a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan?		A/B/C	B	0,5		dapatkan kebijakan keterbukaan informasi, minimal memuat; apa saja yang akan diunggah ke pada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang men-update.	a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik.		
	b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik?		A/B/C	B	0,5		dapatkan laporan evaluasi	a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti; b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti; c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan.		

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)		10,0		9,30	92,97%				
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5)	0,5		0,50	100,00%				

	a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T	Ya	1		dapatkan dokumen rencana kebutuhan pegawai, memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai)	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing- masing jabatan.		
	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A/B/C/D	A	1		lakukan sampel atas pelaksanaan rencana kebutuhan pegawai, (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru, upaya peningkatan kompetensi)	a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.		
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Y/T	Ya	1		dapatkan laporan monev.	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.		
2	Pola Mutasi Internal (1)	1,0			1,00	100,00 %				
	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	Ya	1		dapatkan dokumen pola rotasi (klo ada), klo tidak ada, wawancara dan catat bagaimana pola rotasi internal?	Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.		
	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		A/B/C/D/E	A	1		wawancara pelaksanaan pola rotasi, cek SK rotasi terakhir,	a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.		
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		Y/T	Ya	1		laporan evaluasi	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.		
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5)	2,5			2,29	91,67%				
	a. Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi?		Y/T	Ya	1		1) dapatkan kebijakan pengembangan kom petensi (klo ada) kalo tidak ada wawancara	Ya, jika sudah dilakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi.		

	b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?		A/B/C/D	A	1			<p>a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.</p>		
	c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?		A/B/C/D	A	1			<p>a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%;</p> <p>b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%;</p> <p>c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75%;</p> <p>d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%.</p>		
	d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?		A/B/C/D	A	1		1) dapatkan kebijakan pengembangan kompetensi (klo ada) kalo tidak ada wawancara upaya pengembangan kompetensi, 2) lakukan sample pada 1-2 upaya pengembangan kompetensi (dapatkan notulen pelatihan).	<p>a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;</p> <p>b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;</p> <p>c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;</p> <p>d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.</p>		
	e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?		A/B/C/D	A	1		1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan pengembangan kompetensi, 2) catat bagaimana menentukan/menunjuk pegawai yang akan mengikuti diklat.	<p>a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai;</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai;</p> <p>c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai;</p> <p>d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai.</p>		
	f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		A/B/C	B	0,5		1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan pengembangan kompetensi, 2) catat bagaimana menentukan/menunjuk pegawai yang akan mengikuti diklat.	<p>a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala;</p> <p>b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala;</p> <p>c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan.</p>		
4	Penetapan kinerja individu (4)	4,0			4,00	100,00 %				

a.	Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?		A/B/C/D	A	1	1) dapatkan SKP dan sasaran organisasi, teliti keselarasannya antara sasaran organisasi, program kegiatan seksi, dan output individu.	a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP); b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi.		
b.	Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya?		A/B/C/D	A	1	teliti keselarasannya antara sasaran organisasi, program kegiatan seksi, dan output individu.	a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan <i>logic model</i> ; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.		
c.	Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?		A/B/C/D/E	A	1	teliti pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi, seksi dan individu)	a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan; c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran; d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan; e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan.		
d.	Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)?		Y/T	Ya	1	teliti kegunaan penilaian kinerja individu, 2) lakukan sample untuk 1 pegawai yang berprestasi,	Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).		
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5)		1,5			1,01	67,00%			
a.	Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?		A/B/C/D	B	0,67	laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.		
6. Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)		0,5			0,50	100,00 %			

a.	Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?		A/B/C	A	1		dapatkan jadwal pemutahiran, 2) lakukan cek untuk update terakhir,	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan.		
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)		10,0			8,96	89,56%				
1	Keterlibatan pimpinan (5)	5,0			5,00	100,00%				
a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?		A/B/C	A	1		dapatkan notulen penyusunan perencanaan	a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan.		
b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja?		A/B/C	A	1		dapatkan notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap level)	a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja.		
c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?		A/B/C/D	A	1		dapatkan jadwal pemantauan dan laporan pemantauan 2) cek pemantauan kinerja terakhir	a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan; b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan; c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja; d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja.		
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5,0			3,96	79,13%				
a.	Apakah dokumen perencanaan sudah ada?		Y/T	Ya	1		dapatkan dokumen perencanaan	ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap.		
b.	Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?		Y/T	Ya	1		teliti kualitas dokumen perencanaan, apakah sasaran/KU berorientasi hasil	ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.		
c.	Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?		Y/T	Ya	1		dapatkan IKU,	ya, jika unit kerja memiliki IKU.		

d.	Apakah indikator kinerja telah SMART?		A/B/C/D	C	0,33		teliti kualitas IKU apakah relevan, cukup dan dapat diukur secara obyektif dalam mengukur sasaran/KU	a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.		
e.	Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?		Y/T	Ya	1		dapatkan laporan kinerja teliti tanggal laporan kinerja	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.		
f.	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?		A/B/C	A	1		teliti laporan kinerja, cek substansi laporan apakah ada informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, analisisnya dan rencana aksi kedepan.	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja; c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja.		
g.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?		Y/T	Tidak	0		dapatkan upaya peningkatan kapasitas SDM (sosialisasi, pelatihan dll)	ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.		
h.	Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?		A/B/C	A	1			a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten; c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten.		
PENGUATAN PENGAWASAN (15)		15,0			13,45	89,68%				
1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3,0			3,00	100,00%				
a.	Apakah telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi?		A/B/C	A	1		dapatkan metode sosialisasi, media informasi dan teliti cakupan audiencenya, sample ke pegawai apakah tau keberadaan kebijakan gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasi nya.	a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala; b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala; c. Jika belum dilakukan public campaign.		
b.	Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?		A/B/C/D	A	1		dapatkan laporan tahunan penanganan gratifikasi	a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur; b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan; c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian; d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.		
2	Penerapan SPIP (3)	3,0			2,63	87,50%				
a.	Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?		A/B/C/D/E	A	1		dapatkan upaya pengendalian (impromisasi)	a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang		

b.	Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?		A/B/C/D/E	A	1		dapatkan peta risiko, 2) klo tidak ada, wawancara kepada pihak terkait, apakah tau risiko dari organisasi, bandingkan dengan SOP.	a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian risiko.		
c.	Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi?		A/B/C	A	1		dapatkan kegiatan meminimalisir risiko, bandingkan dengan risiko yang akan terjadi.	a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko.		
d.	Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait?		A/B/C	B	0,5		dapatkan media informasi, dan cek cakupan audience nya, 2) lakukan sample kepada 1-2 pegawai, apakah mengetahui adanya SPI.	a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait; c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait.		
3	Pengaduan Masyarakat (3)	3,0			3,00	100,00 %				
a.	Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan?	0,5	A/B/C	A	1		dapatkan kebijakan pengaduan masyarakat, apakah unit pengelola pengaduan masyarakat.	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.		
b.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	1,5	%	100,00%	1,00			Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan.		
	a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		Jumlah	3						
	b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		Jumlah	0						
	c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		Jumlah	3						

	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat?	0,5	A/B/C	A	1		dapatkan laporan monev pengaduan masyarakat	a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala; c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi.		
	d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?	0,5	A/B/C	A	1		dapatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat, bandingkan tindak lanjutnya dengan rekomendasinya. (hub kausalitas dengan pertanyaan sebelumnya)	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti.		
4	Whistle-Blowing System (3)	3,0			2,63	87,50%				
	a. Apakah <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi?		Y/T	Ya	1			Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja.		
	b. Apakah <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan?		A/B/C	A	1		dapatkan kebijakan WBS, dapatkan apakah ada unnt pengelola WBS,	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System.		
	c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> ?		A/B/C	A	1		dapatkan laporan monev WBS	a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala; c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi.		

	d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti?		A/B/C	B	0,5		dapatkan tindak lanjut WBS, bandingkan tindak lanjutnya dengan rekomendasinya. (hub kausalitas dengan pertanyaan sebelumnya)	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> belum ditindaklanjuti.		
5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3,0			2,20	73,40%				
	a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?		A/B/C/D	A	1		dapatkan kebijakan benturan kepentingan, teliti jenis hubungan benturan kepentingan	a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama; b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama; c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama; d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.		
	b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi?		A/B/C/D	A	1		dapatkan media informasi, notulen sosialisasi, teliti cakupan audiensinya	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/ diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan.		
	c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan?		A/B/C/D	B	0,67		dapatkan prosedur pelaporan benturan kepentingan, wawancara apakah ada dilaksanakan, 2) sample ke pegawai apakah tau ttg kebijakan kepentingan	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan.		
	d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?		A/B/C	B	0,5		dapatkan laporan monev benturan kepentingan	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja.		
	e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti?		A/B/C	B	0,5		dapatkan tindak lanjut benturan kepentingan, bandingkan tindak lanjutnya dengan rekomendasinya. (hub kausalitas dengan pertanyaan sebelumnya)	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.		
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10,0			5,21	52,08%				
1	Standar Pelayanan (3)	3,0			0,94	31,25%				
	a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan?		A/B/C	C	0		dapatkan standart pelayanan	a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan.		

	b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumkan?		A/B/C/D/E	C	0,5		apakah standar pelayanan telah diumumkan, cek media pengumumannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika belum terdapat standar pelayanan yang telah dimaklumkan. 		
	c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan?		A/B/C/D/E	B	0,75		dapatkan SOP pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum mempunyai SOP tentang pelaksanaan standar pelayanan. 		
	d. Apakah telah dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP?		A/B/C	C	0		laporan review SOP, dan cek tindak lanjutnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika unit kerja melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; b. Jika unit kerja melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. 		
2	Budaya Pelayanan Prima (3)	4,0			2,60	65,00%				
	a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima?		A/B/C/D	A	1		dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima, teliti pesertanya dan materi sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan; b. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai yang memberikan pelayanan; c. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian kecil pegawai yang memberikan pelayanan; d. Jika belum terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima. 		

	b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media?		A/B/C	A	1		dapatkan media informasi layanan, cek cakupan audience-nya	a. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb); b. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); c. Jika informasi pelayanan belum dapat diakses melalui berbagai media.		
	c. Apakah telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?		A/B/C	C	0		dapatkan sistem reward n punishment, lakukan sample untuk pemberian reward n punishment	a. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan; b. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan; c. Jika belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.		
	d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi?		A/B/C/D	A	1			a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara		
	e. Apakah terdapat inovasi pelayanan?		A/B/C/D/E	D	0,25		dapatkan inovasinya (cek nominasi dari deputi yanlik)	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekati pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekati pelayanan dengan masyarakat; c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan.		
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)		3,0			1,67	55,67%				
	a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan?		A/B/C	A	1		dapatkan hasil survey	a. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala; b. Jika survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala; c. Jika belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.		
	b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka?		A/B/C	C	0		teliti hasil survey apakah dapat diakses secara terbuka, lakukan pengujian	a. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb); b. Jika hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); c. Jika hasil survei kepuasan masyarakat belum dapat diakses melalui berbagai media.		
	c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat?		A/B/C/D	B	0,67		dapatkan tindak lanjut dari hasil survey, bandingkan dengan hasil survey. Teliti keterkaitannya	a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat; b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat; c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat; d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.		
TOTAL PENGGUKIT		60,0			48,86	81,43%				

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20,0	0-4		19,18	96%				

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0		3,781	14,18	94,53%		Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi		
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,0	0-100%	100,00%	5,00	100,00%				
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	20,0			14,75	74%				
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	0-4	2,95	14,75	73,75%		Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan		
TOTAL HASIL	40,0			33,93	84,82%				
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				82,79					

BERITA ACARA HASIL DESK REVIU KINERJA IMPLEMENTASI WBK TAHUN 2020

BERITA ACARA HASIL DESK REVIU KINERJA IMPLEMENTASI WBK TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa, Tanggal Satu Bulan Desember Tahun 2020 telah dilaksanakan desk reviu Kinerja Implementasi WBK Satker berikut ini:

Nama Satuan Kerja : KKP Merauke

Adapun Hasil Desk disimpulkan sebagai berikut:

No.	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	KOMPONEN PENGUNGKIT	48,87	
1	Manajemen Perubahan	8,00	
2	Penataan Tataaksana	3,95	
3	Penataan Sistem manajemen SDM	9,30	
4	Penguatan Akuntabilitas	8,96	
5	Pengadaan Pengawasan	18,15	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,21	
II	KOMPONEN HASIL	33,93	
1	Pemerintah yg Bersih dan Bebas KKN	19,18	
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal)	14,18	
b	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yg ditindaklanjuti (Internal dan Eksternal)	5	
2	Kualitas Pelayanan Publik	14,75	
a	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	14,75	
TOTAL NILAI		82,80	

Petugas Desk Satuan Kerja,



Yulianti Lande, S.Si, Apt
NIP 197407181994032002

Kepala Satuan Kerja,



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

Mengetahui,

Petugas Desk Eselon 1 Ditjen P2P,

Firman Septiadi, SKM, MAP
NIP 197009101993031001

Kepala Bagian Hukormas,

dr. Iqbal Djakaria
NIP 197212232002121001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE

Jl. Prajurit Merauke 99616

Telp: (0971) 3330263, e-mail: kkpmerk@gmail.com, Website: kkpmerauke



SURAT TUGAS

NOMOR: KM.05.02/1/ ~~2656~~ /2020

Sehubungan dengan surat nomor KM.05.02/3/1144/2020 Tanggal 06 Juli 2020, dengan ini kami menugaskan kepada :

(Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan terlampir)

- Untuk :
1. Mengikuti *Zoom Meeting* Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIP) Kementerian Kesehatan RI pada hari Rabu tanggal 22 Juli Pukul 11.30 s/d Selesai.
 2. Melaksanakan tugas tersebut dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.
 4. Surat Tugas ini berlaku tanggal 22 Juli 2020.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

22 Juli 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke,



[Signature]
dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

Lampiran
Nomor : KM.05.02/1/ 2656 /2020
Tanggal : 23 Juli 2020

DAFTAR PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1	Yulianti Lande, S.Si., Apt	197407161994032002	IV/a	Ka Subbag Tata Usaha
2	Delifour BR Hutagaol, SKM	197502262002122010	III/c	Kasie PKSE
3	dr. Andi Farida	198410272015032003	III/c	Dokter
4	Tri Nindi Gaib, A.Md., KL	199406012018012001	II/c	Sanitarian
5	Sabtaarisandi Sinaga, A.Md., Komp	-	-	Honorer

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke,



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

LAPORAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)

RABU, 22 JULI 2020

1. Peserta :
 - a. dr. Bambang Budiman (Kepala Kantor)
 - b. Yulianti Lande SSi., Apt. (Kasubbag TU)
 - c. Delifour BR Hutagaol, SKM (Kasie PKSE)
 - d. dr. Andi Farida (Koord. Pelabuhan laut/Ketua Pokja 6)
 - e. Tri Nindi Gaib, A.Md., KL (Staf PRL dan KLW/admin SIPP)
 - f. Sabtaarisandi Sinaga, A.Md., Komp. (Staf Tata Usaha/Pengelola website)
2. Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
3. Penyelenggara : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
4. Metode Pelaksanaan : Vicon (meeting ID 3581500567, Password 3NTyw3)
5. Hal-hal yang dibahas :
 - a. SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan public kepada masyarakat
 - b. SIPP memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menemukan

informasi yang dibutuhkan seputar pelayanan public

- c. Kepada masing-masing instansi diberikan panduan mengenai cara menggunakan aplikasi SIPP dengan baik dan benar, sehingga data informasi yang diakses oleh masyarakat dapat disampaikan dengan baik
- d. Masing-masing instansi menunjuk 1 (satu) orang admin untuk mengelola SIPP

Demikian laporan singkat pelaksanaan kegiatan

Mengetahui
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Merauke



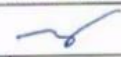



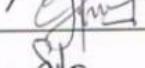

Dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

Merauke, 23 Juli 2020
Notulis



Sabtaarisandi Sinaga

DAFTAR HADIR KEGIATAN SOSIALISASI SIPP
KAMIS 22 JULI 2020

NO	NAMA	JABATAN	NIP	TANDA TANGAN
1	dr. Bambang Budiman	Kepala Kantor	196905312006041001	
2	Kulianti Londe	Kasubbag TU	197907161959032002	
3	Delitour Belsia-H.	Ka. SIE PKSE	197502262002122010	
4	dr Andri . Ferida	Staf PRI & KIW	198910272015032007	
5	Eni Sartika . S	Staf TU	198007142014072007	
6	SARTANUSAHNI SINAGA	Staf TU		

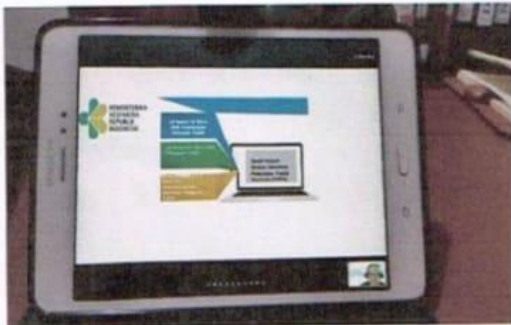
Merauke 22 Juli 2020

Mengetahui
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

Lampiran kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Rabu 22 Juli 2020





SURAT TUGAS
NOMOR: KN.01.04/1/178 /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menugaskan kepada :

Nama : Rika Pratiwi, AMK
NIP : 198906112015032004
Pangkat / Golongan : Pengatur TK. I (II/d)
Jabatan : Perawat

- Untuk :
1. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Makassar.
 2. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DIPA KKP Kelas III Merauke Tahun Anggaran 2020 dengan Kode MAK 2063.970.055.D.524111.
 3. Melaksanakan tugas tersebut dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.
 5. Surat Tugas ini berlaku tanggal 24 s/d 25 Februari 2020.
 6. Tidak melakukan rekam absensi datang dan/atau pulang.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kegiatan I.
Biaya pusat



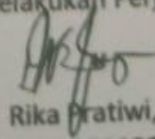
Suprpto SKM., M.Kes (Epid)
NIP 197005181993031001

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Dasar : Undangan Workshop Monev dan Konsolidasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Maksud : Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran No. HK.02.02/II/97/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa tahun 2020 di lingkungan kementerian agar melakukan optimalisasi capaian realisasi anggaran maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu dilaksanakan upaya percepatan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa sehingga menghasilkan barang/jasa yang bermutu.
3. Tujuan : • Pemantapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempertimbangkan prioritas serta pemantauan secara ketat atas perkembangan pelaksanaan PBJ
• Mengutamakan penggunaan metode e-Purchasing melalui e-Katalog
• Percepatan pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa
• Penggunaan aplikasi SPSE v4.3 dalam penginputan pengadaan barang dan jasa
4. Pelaksanaan : Rabu-jumat / 26-28 Februari 2020
5. Tempat : Bogor Valley Hotel
Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 5 Kedung Badak, Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat 16152
6. Hasil : 1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah di umumkan dalam aplikasi SIRUP
2. Melakukan Percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020 dengan mengutamakan pengadaan melalui E-Purchasing
3. Pengelola PBJ di Unit Utama dapat secara aktif memantau perkembangan pelaksanaan PBJ tahun 2020.

Demikian Laporan kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.

Yang Melakukan Perjalanan Dinas



Rika Pratiwi, AMK
NIP. 198906112015032004

FOTO KEGIATAN



Scanned by TapScanner

SERTIFIKAT

Workshop Money PBJ 2020

KN. 01.04/3/572/202

Diberikan atas keikutsertaan pada kegiatan
"Workshop Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"
di lingkungan Kementerian Kesehatan RI

kepada :

Rika Pratiwi, AMK / 198906112015032004

Bogor, 28 Februari 2020

Kepala Biro Keuangan dan BMN

Drs. Setyo Budi Hartono, MM
NIP. 196105091986031001



LKPP



LPSE



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE

Jl. Prajurit Merauke 99616

Telp: (0971) 3330263, e-mail: kkpmrk@gmail.com, Website: kkpmerauke.com



SURAT TUGAS

NOMOR: KU.04.03/1/ 453 /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menugaskan kepada :

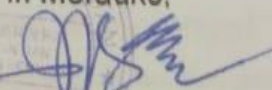
N a m a : **Andarias Paskawanto Kolawi, SKM., MPH**
N I P : 197904162003121002
Pangkat/ Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Epidemiolog Kesehatan Ahli

- Untuk :
1. Mengikuti Undangan Pertemuan Rekonsiliasi Reviu Laporan Keuangan UAPPA/B Eselon 1 Ditjen P2P TA 2019 (Satker Kantor Pusat, UPT dan Dekonsentrasi) di Hotel Horison Bekasi Jl. KH. Noer Alie, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi Jawa Barat 17148.
 2. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DIPA KKP Kelas III Merauke Tahun Anggaran 2020 dengan Kode MAK 2063.970.052.B.524111.
 3. Melaksanakan tugas tersebut dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.
 5. Surat Tugas ini berlaku tanggal 20 s/d 26 Januari 2020.
 6. Tidak melakukan rekam absensi datang dan/atau pulang.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

15 Januari 2020

Pih Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke,


Yulianti Lande, S.Si., Apt
NIP 197407161994032002

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN MERAUKE



Jl. Prajurit Merauke 99616

Telp. (0971) 324511, Fax: (0971) 3330263, E-mail: kkpmerk@gmail.com, Website: www.kkpmerauke.com

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Pelaksana yang melakukan perjalanan:

- a. Nama : Andarias Paskawanto Kolawi, SKM., MPH
- b. NIP : 197904162003121002
- c. Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)
- d. Jabatan : Staf Seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi

2. Lamanya perjalanan dinas : 6 hari (Tgl 20 s d 25 Januari 2020)

3. Tujuan perjalanan dinas :

Tujuan perjalanan dinas adalah untuk: Mengikuti Pertemuan Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahunan UAPPA/B Ditjen P2P TA 2019 (Satker Kantor Pusat, UPT, Dekonsentrasi), tanggal 20-25 Januari 2020 di Bekasi, Jawa Barat.

4. Kegiatan selama perjalanan dinas

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama perjalanan dinas adalah mengikuti acara pembukaan, mendengarkan penyampaian materi dari narasumber, melaksanakan Desk Laporan Penilaian PIPK dengan petugas Desk dari Eselon 1 Ditjen P2P, dan melaksanakan penginputan dan perbaikan Laporan Penilaian PIPK ke dalam aplikasi e-PIPK sesuai arahan perbaikan dari petugas Desk.

5. Hasil perjalanan dinas

Berdasarkan waktu pelaksanaan, kegiatan pertemuan dibagi menjadi dua, yaitu 2 hari pertama (20-21 Januari 2020) digunakan untuk acara pembukaan dan penyampaian materi, sedangkan 4 hari selanjutnya (22-26 Januari 2020) digunakan untuk pelaksanaan Desk Simak BMN, SAIBA, dan Laporan Penilaian PIPK. Pada pertemuan ini diperkenalkan aplikasi e-PIPK dan cara penginputannya bagi semua petugas penilai PIPK.

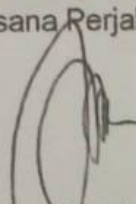
Untuk pelaksanaan Desk Simak BMN dan SAIBA KKP Merauke dapat dituntaskan oleh petugas dari KKP Merauke pada hari pertama pelaksanaan Desk, sedangkan untuk desk

PIPK masih ditemukan beberapa kekurangan sehingga diminta oleh petugas Desk dari Ditjen P2P agar diperbaiki dan diserahkan keesokan harinya. Kekurangan yang perlu diperbaiki yaitu, pertama, belum dibuatnya atau dimasukkannya Tabel A dan tabel-tabel selanjutnya khusus untuk Kas Bendahara Pengeluaran baik di dalam laporan penilaian PIPK dan aplikasi e-PIPK. Kekurangan kedua yang perlu ditindaklanjuti yaitu adanya nama tim penyusun laporan keuangan yang masuk dalam SK tim penilai PIPK, sehingga SK Tim Penilai PIPK tahun 2019 harus diubah.

Setelah dilakukan penginputan Tabel A kas bendahara pengeluaran ke aplikasi e-PIPK dan dilakukan Desk pada keesokan harinya, petugas Desk PIPK dari Ditjen P2P menyatakan dapat menerima laporan PIPK dengan mengeluarkan berita acara penyerahan data laporan PIPK KKP Merauke dengan catatan melengkapi dokumen pada Tabel C1 di aplikasi e-PIPK. Untuk melengkapi dokumen pada Tabel C1 pada akun persediaan, belanja modal peralatan dan mesin, dan kas bendahara pengeluaran di aplikasi e-PIPK, tim penilai menghubungi petugas bendahara di Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke agar menyiapkan dan mengirimkan dokumen yang diperlukan. Tanggal 23-26 Januari 2020 digunakan petugas penilai PIPK untuk mengupload dokumen-dokumen yang diterima dari kantor ke aplikasi PIPK. Hasil Desk laporan PIPK KKP Merauke adalah tuntas dengan catatan. Catatan yang masih perlu ditindaklanjuti adalah jumlah sampel agar disesuaikan dengan jumlah yang diminta dalam aplikasi e-PIPK. Tindaklanjut kegiatan ini akan dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke.

Merauke, 27 Januari 2020

Pelaksana Perjalanan Dinas



Andarias P. Kolawi, SKM, MPH

NIP. 197904162003121002

Scanned by TapScanner

Dokumentasi Kegiatan



Gbr 1 Foto bersama peserta Desk



Gbr 2 Sambutan Seditjen P2P



Gbr 3 Pelaksanaan Desk PIPK



Gbr 4 Pelaksanaan Desk PIPK

Scanned by TapScanner